

# Kata Pengantar



Puji syukur senantiasa tercurah kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang membutuhkan sekaligus diharapkan menjadi penyempurnaan dokumen perencanaan serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Hal ini juga merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, yang diharapkan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Isi dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan operasional di Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja, yang juga dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021. Hal lain yang tercantum dalam Laporan Kinerja ini adalah Dokumen Penetapan Kinerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 yang berfungsi untuk

menjadi pengendali pencapaian kinerja organisasi, capaian realisasi kinerja dan alat ukur keberhasilan organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus dibenahi, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Daerah.

Malili,       Maret 2022



BUPATI LUWU TIMUR,

*[Handwritten signature]*  
Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	1
	B. Posisi Strategis Kabupaten Luwu Timur	4
	C. Isu-isu Strategis Kabupaten Luwu Timur	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	7
BAB III	CAPAIAN KINERJA	
	A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KAB. LUWU TIMUR	10
	B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	13
	1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	
	2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah	

4.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	
5.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
6.	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan	
C.	REALISASI ANGGARAN	108
D.	CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN	111
BAB IV	PENUTUP	
A.	SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA	116
B.	LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA	117
LAMPIRAN		

## A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten yang terletak di ujung timur Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Timur : Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone.
- Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Geografis**

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak diantara 2<sup>0</sup>03'00" sampai dengan 3<sup>0</sup>03'25" Lintang Selatan dan 119<sup>o</sup>28'56" sampai dengan 121<sup>o</sup>47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada pada kawasan Pegunungan Verbeck, namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran dan rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung berada dibagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran berada dibagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dan yang terluas berada di Kecamatan Angkona, Kecamatan Bura, Kecamatan Wotu, Kecamatan Malili dan Kecamatan Mangkutana. Sedangkan kondisi berbukit dan bergunung yang terluas berada di Kecamatan Nuha, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, memiliki luas wilayah 6.944,88 km<sup>2</sup> atau 11,14 % luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan, 124 desa dan 3 kelurahan. Kabupaten Luwu Timur berada pada ketinggian 0 - 1.230 m diatas permukaan laut dengan struktur wilayah terdiri atas dataran rendah, tinggi dan wilayah pesisir. Kondisi topografi dan kelerengan berada pada kisaran 0 – 2%, 2 – 15%, 15 – 30%, 30 – 40% dan > 40%.

Kabupaten Luwu Timur sebagaimana daerah tropis lainnya, mempunyai suhu berkisar antara 22,5°C – 33,6°C, termasuk dalam tipe iklim A (*Schmidt – Ferguson*), dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada tahun 2014 tercatat rata-rata curah hujan mencapai 300 mm dengan rata-rata jumlah hujan perbulan mencapai 16 hari.



### ***Penduduk***

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur Tahun per 31 Desember 2021 adalah 304.938 yang terdiri dari 157.367 jiwa laki-laki dan 147.571 dimana data tersebut bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur. Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 308 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di kecamatan Mangkutana dan Wasuponda sebesar 17 jiwa/km<sup>2</sup>

## Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

Daftar Bupati Masa Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur

No.	Bupati	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Prd.	Wakil Bupati	Ket.
—	 H. Andi Hatta Marakarna IP	3 Mei 2003	2005	—	—	
—	 Drs. Andi Baso Geni M.Si.	2005	2005	—	—	
1	 H. Andi Hatta Marakarna IP	27 Agustus 2005	27 Agustus 2010	1	H. Saidy Mansur	
		27 Agustus 2010	27 Agustus 2015	2	Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	
—	 H. Imnan Yasin Limpo SH	30 Agustus 2015	17 Februari 2016	—	—	[R]
2	 Ir. H. Muhammad Thoriq Husler	17 Februari 2016	24 Desember 2020	3	Iwan Bachri Syam ST	[Kek. 1]
		24 Desember 2020	11 Februari 2021			[11]
3	 Iwan Bachri Syam ST	11 Februari 2021	17 Februari 2021	—	—	[12]
—	 Bahri Sull (Pelaksana Harian)	17 Februari 2021	26 Februari 2021	—	—	[12]
Lowong		26 Februari 2021	5 April 2021	4	Budiman Hakim	[Kek. 2]
4	 Budiman Hakim	5 April 2021	Petahana		—	[15]

**Keterangan**

- <sup>1</sup> \* Bupati Thoriq Husler meninggal pada saat menjabat<sup>[10]</sup>
- <sup>2</sup> \* Muhammad Thoriq Husler memenangkan pilkada Luwu Timur 2020 bersama Budiman Hakim, tetapi Thoriq meninggal pada 24 Desember 2020, sehingga Budiman Hakim diangkat sendiri sendiri sebagai Wakil Bupati Luwu Timur<sup>[12][14]</sup>

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat penambahan jumlah perangkat daerah yang sebelumnya 39 OPD menjadi 41 OPD.

Di samping Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdapat pula kelompok 3 (tiga) jabatan struktural Staf Ahli yakni, 1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan, 2) Staf Ahli Bidang Pembangunan, 3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

### ***Kepegawaian***

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2021 sebanyak 3.935 orang. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan I sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 496 orang, golongan III sebesar 2615 orang, dan golongan II sebanyak 816 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 1440 orang dan Pegawai Perempuan sebanyak 2495 orang.

## **B. POSISI STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR**

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan penyusunan kembali terhadap Dokumen RPJMD untuk periode Bupati terpilih 2021-2026 yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2021-2026, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan Nasional.

RPJMD daerah disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah yakni “Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”.

Dalam rumusan visi terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Kata kunci tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

**Berkelanjutan** adalah mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran bahwa apa yang baik dimasa lalu dapat diteruskan ke masa depan, kemudian apa yang buruk di masa lalu hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan .

**Lebih Maju** adalah bahwa apa yang akan dilakukan kedepan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang baik dimasa lalu tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik dari sebelumnya.

**Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya** adalah bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tersebut dijabarkan kedalam misi sebagai upaya-upaya umum dalam pencapaian visi yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

### C. ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN LUWU TIMUR

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan urusan, isu global, isu nasional dan isu Propinsi tersebut, maka prioritas isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat diuraikan. Prioritas ini disusun dengan menggunakan kriteria kesesuaian dengan visi-misi Kepala Daerah, tingkat kompleksitas dan kegentingan masalah, tingkat kemendesakan masalah untuk diatasi, dan kriteria lainnya. Uraian isu strategis tersebut dinyatakan dalam bentuk poin isu, dengan alasan bahwa penjelasan berbagai aspek atas isu-isu tersebut telah diuraikan pada identifikasi permasalahan, isu global, isu nasional, dan isu propinsi. Adapun daftar prioritas isu strategis daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan;
3. Meningkatnya pemberdayaan gender;
4. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah;
5. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha;
6. Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah;
7. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
9. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
10. Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat;
11. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

Perjanjian Kinerja Bupati Luwu Timur Tahun 2021 merupakan rangkuman dari penetapan kinerja dari beberapa perangkat daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang indikator kinerja utamanya ditentukan dari penyesuaian atau pemetaan terhadap sasaran strategis Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan perjanjian kinerja tiap –tiap SKPD yang telah di tandatangani antara Pihak pertama dengan Kepala OPD yang bersangkutan akan dikembalikan ke masing-masing OPD untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Adapun Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2021 adalah sebagai Berikut :

**Tabel II.1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

**Visi :**

**“ Luwu Timur Yang berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya“**

No.	Misi	No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai nilai budaya	1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor-Sektor Perekonomian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rupiah)	16,74
				PDRB Perkapita ( Juta Rp)	76,92
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,09
		2.	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	92,82
				Indeks Gini (nilai)	0,392
				Nilai Tukar Petani (nilai)	105,58

		3.	Meningkatnya apresiasi nilai-nilai budaya yang mendukung perekonomian serta ketahanan budaya	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	12,24
				Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya (%)	85,56
		4.	Terpeliharanya keamanan wilayah dan ketertiban umum	Cakupan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban (%)	96,67
II	Mendorong peningkatan investasi daerah	5.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	651.100
III	Memanfaatkan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	6.	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan Kinerja Penataan Ruang (%)	6,75
		7.	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (%)	74
IV	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam mencapai kualitas manusia yang tinggi	8.	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan	Angka Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,83
				Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,83
				Angka Melek Huruf (%)	99,77
				Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,16
V	Meningkatkan kapasitas infrastruktur serta sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang percepatan pembangunan daerah	9.	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Daerah	Indeks Pembangunan Infrastruktur (nilai)	58,71

VI	Mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik	10	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Pelayanan Publik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan (Predikat)	WTP
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	68,12
				Nilai LPPD (Nilai)	3,28
				Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik (Nilai)	83,21
VII	Mendorong Berkembangnya Kehidupan Religius dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama	11	Terwujudnya Kerukunan Masyarakat	Cakupan Kinerja Penguatan Kerukunan Masyarakat	97,66
VIII	Meningkatkan Koordinasi Dan Kerjasama Antar Daerah	12	Berkembangnya Kerjasama Daerah Dengan Berbagai Pihak	Cakupan Kerjasama Multipihak Yang Dikembangkan	100
		13	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah	Cakupan Kinerja Pengembangan Inovasi Daerah	37,18

Jumlah anggaran untuk mendukung tercapainya indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Rp. 505,209,903,039 (*lima ratus lima milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus tiga ribu tiga puluh rupiah*).

## A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah laporan kinerja yang memuat pertanggungjawaban kinerja Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021, laporan ini merupakan pencapaian Tahun Kelima RPJMD. Dalam penyusunan LAKIP ini dimulai dari pengumpulan data dan pemilahan data dari setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang disatukan dan diperiksa ulang secara seksama, sehingga menghasilkan suatu ikhtisar mengenai hasil capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah yang mencerminkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Ada 2 (dua) cara yang digunakan dalam membandingkan yaitu, *pertama* apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, yang *kedua* apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.1**  
**PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor-Sektor Perekonomian	1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rupiah)	16,74	16,030	95,76%
		2	PDRB Perkapita (Juta Rp)	76,92	78,58	102,16%
		3	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	2,09	4,96 %	42%
2	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	4	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	92,82%	6,59%	94,14%
		5	Indeks Gini (Nilai)	0,392	0,396	101,02%
		6	Nilai Tukar Rupiah (Nilai)	105,58	108,10	102,39%
3	Meningkatnya Apresiasi Nilai-Nilai Budaya Yang Mendukung Perekonomian Serta Ketahanan Budaya	7	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	12,24	13,96%	114,05 %
		8	Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya (%)	85,56	80,32 %	93,88 %
4	Terpeliharanya Keamanan Wilayah Dan Ketertiban Umum	9	Cakupan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban (%)	96,67	93,51%	96,73%
5	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	10	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	651.100.000.000	4.171.740.000.000	640,72%
6	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	11	Cakupan Kinerja Penataan Ruang (%)	6,75	27,42%	405,62%
7	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) (%)	74	84,07%	139,21%
8	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan	13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,83	8,81	99,77%
		14	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,83	70,63	100,67%

		15	Angka Melek Huruf (Tahun)	99,77	99,41	99,64%
		16	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,16	12,84	100,08%
9	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Daerah	17	Indeks Pembangunan Infrastruktur (Nilai)	58,71	65,54	111,63%
10	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Kinerja Pelayanan Publik	18	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan (Predikat)	WTP	WTP**	100%**
		19	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	68,12	61,06**	89,64%**
		20	Nilai LPPD (Nilai)	3,28	3,14**	95,73%**
		21	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik (Nilai)	83,21	85,03	102,19%
11	Terwujudnya Kerukunan Masyarakat	22	Cakupan Kinerja Penguatan Kerukunan masyarakat (%)	97,66	17,09 %	17,50 %.
12	Berkembangnya Kerjasama Daerah Dengan Berbagai Pihak	23	Cakupan Kerjasama Multipihak Yang Dikembangkan (%)	100	100%	100%
13	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah	24	Cakupan Kinerja Pengembangan Inovasi Daerah (%)	37,18	11,53	31,01

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja. Hingga Akhir Tahun 2021 yang merupakan Tahun Kelima Revisi RPJMD 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU Perubahan Tahun 2019 maupun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

Misi pertama sebagaimana tertuang dalam revisi RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Berbasis Sumber Daya dan Didukung oleh Stabilitas Keamanan Wilayah dan Nilai-Nilai Budaya”** dengan tujuan **“Meningkatkan Produksi Sektor-Sektor Perekonomian, Kualitas Kesejahteraan Sosial, dan Apresiasi Kebudayaan Daerah”**. Untuk mencapai misi 1, ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar.

### Sasaran Strategis 1

#### Meningkatnya Kontribusi Sektor-Sektor Perekonomian

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis *“MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN”* dengan 3(tiga) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

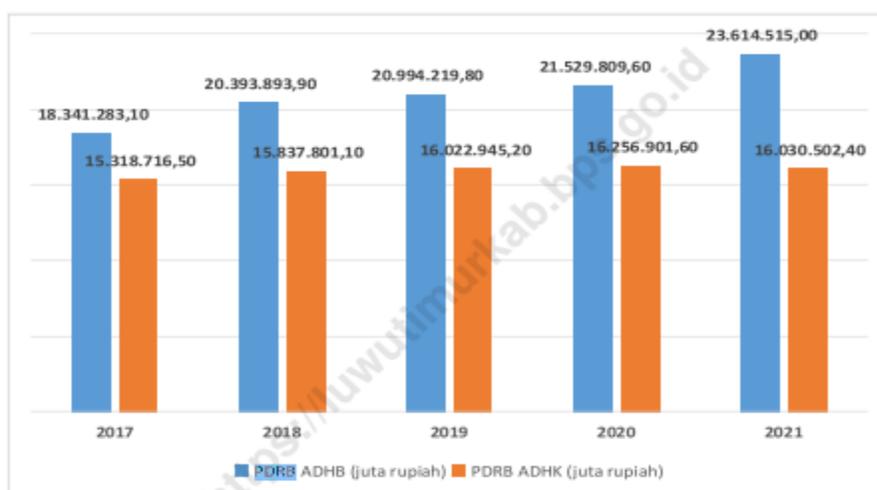
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Triliun (Rp)	16,74	16,030	95,76%
2	PDRB Perkapita	Juta (Rp)	76,92	78,58	102,16%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,09	4,96	42
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>79,97%</b>		

#### A. Indikator Kinerja “PDRB Atas Dasar Harga Konstan”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh nilai PDRB atas Dasar harga Konstan (AHDK) adalah

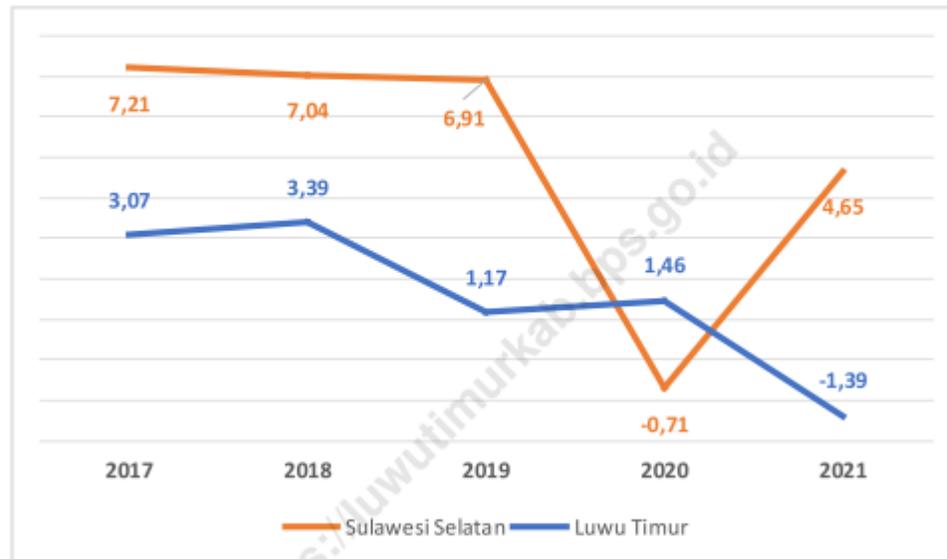
**“Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun n”.**

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2021 ditargetkan sebesar 16,74 dan realisasi kinerja sebesar 16,030 dengan capaian kinerja 95,76%, yang menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan atau adanya kegagalan pencapaian target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana realisasi kinerja sebesar 16,26 dan capaian kinerja sebesar 98,91%, artinya terjadi peningkatan realisasi kinerja namun mengalami penurunan capaian kinerja karena. Adapun Data Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Kab. Luwu Timur dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber/Source: Diolah dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya/Based on census, surveys and others sources

**Gambar 13.1** Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan (%), 2017-2021  
**Figures** *Economic Growth of Luwu Timur Regency and Sulawesi Selatan Province (%), 2017-2021*



Sumber/Source : BPS - Diolah dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya/Statistics Indonesia - Based on census, surveys and others sources

#### B. Indikator Kinerja “PDRB Perkapita”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh nilai PDRB Perkapita adalah :

$$PDRB \text{ Perkapita} = \frac{PDRB}{Penduduk \text{ Pertengahan Tahun}}$$



Untuk PDRB Perkapita tahun 2021 ditargetkan sebesar 76,92 dan realisasi kinerja mencapai 78,58 dengan capaian kinerja 102,16%, yang menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana realisasi target sebesar 72,85 dengan capaian kinerja sebesar 93,97%, artinya terjadi peningkatan realisasi kinerja dan realisasi capaian kinerja dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dari data tersebut dengan melihat pencapaian nilai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur menempati urutan 3 (tiga) nilai PDRB Perkapita ADHB. Indikator ini merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh setiap penduduk sebagai akibat dari adanya aktivitas produksi. Meskipun indikator ini belum bisa menggambarkan pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah, namun kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan tingkat pendapatan riil masyarakat perkapita. PDRB Perkapita dihasilkan dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah tersebut. Bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, maka PDRB perkapita akan naik, namun sebaliknya bila pertumbuhan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, maka PDRB Perkapita akan turun. Dampak dari adanya pertambangan nikel di Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur menjadi sangat tinggi. Adapun Data PDRB

Perkapita Kab. Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan dalam kurun waktu periode 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Kabupaten/Kota	[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)		
	2019	2020	2021
Kepulauan Selayar	47,99	46,73	49,54
Bulukumba	33,96	33,34	36,06
Bantaeng	46,84	45,68	50,95
Jeneponto	27,74	25,70	27,26
Takalar	34,42	34,03	36,76
Gowa	27,50	28,20	30,44
Sinjai	45,05	43,74	47,05
Maros	64,60	47,73	47,88
Pangkep	77,68	74,38	79,19
Barru	41,80	40,36	43,43
Bone	47,81	45,68	48,80
Soppeng	47,83	48,42	52,75
Wajo	49,31	52,16	58,83
Sidrap	46,49	44,12	47,19
Pinrang	52,10	49,84	53,41
Enrekang	35,28	33,54	36,06
Luwu	43,04	43,91	48,55
Tana Toraja	31,66	27,10	28,36
Luwu Utara	41,65	41,07	44,33
Luwu Timur	71,34	72,85	78,58
Toraja Utara	41,08	37,37	39,16
Makassar	117,30	125,32	133,31
Pare Pare	50,06	48,50	51,18
Palopo	43,79	43,66	46,52
SULAWESI SELATAN	57,18	55,68	59,66

### C. Indikator Kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh persentase tingkat pengangguran terbuka adalah:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.052}{162.182} \times 100\%$$

$$= 0,049 \times 100$$

$$= 4,96 \%$$

Angkatan kerja adalah (Labor Force) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran berarti menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 2,09 % dan capaian kinerja 4,96%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana realisasi kinerja sebesar 4,4% dengan persentase capaian kinerja terealisasi sebesar 1,89% dengan persentase sebesar 48%, ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya dan keberhasilan dalam pencapaian target ditahun 2021. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian dengan melihat jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja pada tahun 2020 sebesar 7000 orang, Jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 157.500 bertambah sebanyak 13.833 orang dari tahun 2019. Dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 1.553 orang. Pada tahun 2017 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 3.572, tahun 2018 sebesar 3.145, tahun 2019 bertambah menjadi 5.602 dari 137.236 angkatan kerja, dan tahun 2020 sebanyak 7000 orang. Adapun perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan seluruh Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 13.5** Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017–2021  
*Unemployment Rate (UR) by Regency/Municipality in South Sulawesi Province, 2017–2021*

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2017 <sup>1</sup>	2018 <sup>1</sup>	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepulauan Selayar	2,34	1,74	1,10	2,44	2,81
Bulukumba	3,73	3,42	3,06	3,42	3,14
Bantaeng	5,23	3,39	3,65	4,27	4,07
Jeneponto	3,31	2,63	1,99	2,31	2,38
Takalar	4,93	3,57	3,78	4,16	3,93
Gowa	6,14	4,40	4,35	6,44	4,30
Sinjai	4,53	1,95	2,17	2,65	2,61
Maros	6,85	5,70	4,42	6,28	6,30
Pangkep	7,05	6,13	4,99	5,18	5,86
Barru	5,60	4,96	5,39	6,39	6,74
Bone	4,55	2,56	3,01	3,20	4,15
Soppeng	2,71	2,36	3,24	4,42	3,92
Wajo	3,06	3,51	3,00	4,33	4,32
Sidrap	3,17	4,29	4,35	5,91	4,93
Pinrang	4,41	2,80	2,91	4,19	4,06
Enrekang	1,87	1,61	2,15	2,44	2,34
Luwu	4,78	3,59	4,38	4,94	4,80
Tana Toraja	5,60	2,96	2,55	2,60	3,09
Luwu Utara	3,31	3,56	2,76	3,01	3,91
Luwu Timur	2,58	2,03	3,81	4,46	4,96
Toraja Utara	4,24	2,65	2,86	3,17	2,61

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Rupiah PDRB Atas Dasar harga Konstan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Triliun (Rp)	2017	15,31	99,93%
		2018	15,84	100%
		2019	16,22	100,50%
		2020	16,26	98,91%
		2021	16,030	95,76%

Capaian Rupiah PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
PDRB Perkapita	Juta (Rp)	2017	63,71	99,14%
		2018	69,41	97,46%
		2019	71,34	95,83%
		2020	77,85	93,97%
		2021	78,58	102,16%

Capaian persentase (%) Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	2017	2,58	-
		2018	2,03	100%
		2019	3,81	97,21%
		2020	4,46	48%
		2021	4,96	42%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	94,51	-	98,10	-	98,11	0,98	16,74	16,26	16,74	16,030

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	PDRB Perkapita	64,26	-	71,22	-	73,12	69,90	75,05	70,50	76,92	78,58

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,58	-	2,18	2,18	2,15	2,09	2,12	4,4	2,09	4,96

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun 2021 dengan dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja skala kabupaten dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun ini dengan realisasi kinerja pada daerah lain. Perbandingan antara realisasi kinerja Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa daerah lain untuk sasaran strategis **“MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN”** tahun 2021 sebagai berikut :

a. Capaian PDRB Atas Dasar Harga Konstan :

Untuk keberhasilan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, Kabupaten Luwu Timur masih menduduki urutan ke lima (5) capaian PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebagai berikut :

1. Provinsi Sulawesi Selatan      343 402,51
2. Kota Makassar                    126 312,83
3. Bone                                    23 273,87
4. Pangkep                              17 500,61
5. Luwu Timur                         16 030,50

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2021, Kabupaten Luwu Timur berada pada posisi ke empat (4) tingkat pengangguran terbuka, dan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Barru                                    6,74
2. Maros                                 6,30
3. Pangkep                               5,86

4. Luwu Timur	4,96
5. Sidrap	4,93
6. Luwu	4,80
7. Wajo	4,32
8. Gowa	4,30
9. Bone	4,15
10. Bantaeng	4,07
11. Pinrang	4,06
12. Takalar	3,93
13. Soppeng	3,92
14. Luwu Utara	3,91
15. Bulukumba	3,14
16. Tana Toraja	3,09
17. Ka. Selayar	2,81
18. Sinjai	2,61
19. Toraja Utara	2,61
20. Jeneponto	2,38
21. Enrekang	2,34

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Sektor Pertambangan/Penggalian;
- ✓ Karakteristik wilayah yang sebagian besar terdiri dari pegunungan membuat Kandungan potensi sumber daya mineral di kabupaten Luwu Timur sangatlah besar, kontribusi sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan nilai PDRB menjadikan pertumbuhan ekonomi wilayah ini sangat dipengaruhi oleh naik turunnya produksi Nikel;
- ✓ Sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian masyarakat.
- ✓ Potensi perikanan juga memberi kontribusi cukup besar karena Luwu Timur terletak di pesisir Teluk Bone sehingga tidak mengherankan jika produksi perikanan di Kabupaten ini relatif cukup besar yaitu produksi perikanan, produksi perikanan tangkap serta perikanan budidaya. Kecamatan Malili, Angkona, Burau dan Wotu merupakan produsen utama perikanan laut di Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Hambatan/masalah :**

Dalam pencapaian keberhasilan sasaran tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi dimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur sangat bergantung pada sektor pertambangan, sehingga pada saat harga nikel mengalami penurunan akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- ✓ Mendorong/meningkatkan pembangunan pada sektor pertanian sebagai lokomotif utama pembangunan daerah dimana sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Kab. Luwu Timur.
- ✓ Selain itu mengupayakan peningkatan kontribusi sektor-sektor lainnya selain pertambangan dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui penerapan program pembangunan yang mengarah pada peningkatan sektor riil perekonomian masyarakat.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan
- ✓ Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- ✓ Program Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan
- ✓ Program Pengembangan Penganekaragaman Komsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
- ✓ Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- ✓ Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- ✓ Program Ekonomi Masyarakat Pesisir
- ✓ Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan
- ✓ Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
- ✓ Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
- ✓ Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- ✓ Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- ✓ Program Pelatihan dan Peningkatan SDM
- ✓ Program Pengembangan Ekspor
- ✓ Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp. 13.892.201.969 dengan realisasi sebesar Rp.13.753.069.409 atau 99,00%. dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 79,97% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,00%.

## Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*” dengan 3(tiga) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	7,00%	6,59%	94,14%
2.	Indeks Gini	Nilai	0,392	0,396	101,02%
3.	Nilai Tukar Petani	Nilai	105,58	108,10	102,39%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>99,18%</b>		

#### A. Indikator Kinerja “*Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh persentase penduduk diatas garis kemiskinan (AHDK) adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$= 20.099 / 304.727 \times 100\%$$

$$= 6,59$$

Pada Indikator Kinerja Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan pada tahun 2021 dengan target kinerja sebesar 7,00% dan realisasi kinerja sebesar 6,59% dengan capaian kinerja sebesar 94,14%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana realisasi

kinerja sebesar 6,77% dengan capaian kinerja 95,49%, artinya terjadi penurunan realisasi serta capaian kinerja pada tahun 2021. Adapun data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimana pada tahun 2021 dengan garis kemiskinan 350.576 rupiah/kapita/bulan, terdapat 21,2 ribu atau 6,94 persen penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur. Angka ini turun jika dibandingkan tahun 2020 sebanyak 20,83 ribu atau 6,85 persen penduduk miskin.

Jika dibandingkan selama enam tahun terakhir, mulai 2014-2019 jumlah penduduk miskin angkanya terjadi fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur sekitar 20,78 ribu jiwa, kemudian pada tahun berikutnya 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 19,67 ribu jiwa. Selanjutnya pada dua tahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi 21,08 ribu jiwa ditahun 2016 dan 21,94 ribu jiwa ditahun 2017. Pada tahun 2018 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 21,15 ribu jiwa, kemudian pada tahun terakhir 2019 menjadi 20,83 ribu jiwa.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur yg juga bervariasi selama enam tahun terakhir. Pada tahun 2014 persentase penduduk miskin sebesar 7,67%, kemudian turun menjadi 7,18 % pada tahun 2015. Pada Tahun 2016 persentase kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,52 % dan terus mengalami peningkatan menjadi 7,66 pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 persentase penduduk miskin kembali menurun menjadi 7,23%, kemudian disusul pada tahun 2019 menjadi 6,98%.



Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk

miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sekaligus juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan penduduk. Tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

#### B. Indikator Kinerja “*Indeks Gini*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk menghitung nilai indeks gini adalah:

$$G = 1 \sum_{i=1}^{i<} P_i(Q_i + Q_i - 1)$$

Dimana :

P<sub>i</sub> : Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i

Q<sub>i</sub> : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi setiap tahun, hal ini tergambar pada gini ratio dari tahun ke tahun. Untuk Tahun 2021 gini ratio ditargetkan 0,392 dengan realisasi kinerja 0,396 dengan capaian kinerja sebesar 101,02%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana realisasi kinerja 0,405 dengan capaian kinerja 97,0%, artinya terjadi penurunan realisasi kinerja dengan melihat angka dan kenaikan pada capaian target kinerja. akan tetapi indek gini ratio menggunakan rumus terbalik, artinya semakin turun angka gini ratio menandakan tingkat ketimpangan dapat ditekan, dengan kata lain terjadi peningkatan realisasi capaian kinerja pada indikator gini ratio. Sementara Untuk tahun 2015 Gini ratio berada pada nilai 0,467, jika dibandingkan pada tahun 2016 terjadi penurunan gini ratio menjadi 0,434, sementara pada tahun 2017 nilainya menjadi 0,411. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 juga mengalami penurunan nilai menjadi 0398, kemudian tahun 2019 0,387, dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan gini ratio sebesar 0,405 hal ini

menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Luwu Timur bisa ditekan pada setiap tahunnya, akan tetapi ditahun 2020 kembali mengalami kenaikan dengan melihat target kinerja yang tidak dapat dicapai. Sebagai perbandingan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, gini ratio penduduk Sulawesi Selatan adalah 0,383, sementara tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu Timur adalah 0,405. Artinya Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang masih sangat tinggi. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dan BPS Kabupaten Luwu Timur.

*Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur 3 (tiga) Tahun Terakhir*

Kabupaten/Kota	Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur		
	2019 <sup>1</sup>	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>
Luwu Timur	0,387	0,405	0,396

### C. Indikator Kinerja “*Nilai Tukar Petani*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk menghitung nilai tukar petani adalah:

$$\begin{aligned}
 NTP &= \frac{\text{indeks yang diterima petani (It)}}{\text{indeks yang dibayar petani (Lb)}} \times 100 \\
 &= 448,14 / 414,56 \times 100 \\
 &= 1,08 \times 100 \\
 &= 108,100
 \end{aligned}$$

Untuk Nilai Tukar Petani tahun 2021 ditargetkan sebesar 105,58 dan realisasi kinerja mencapai 108,10 dengan capaian kinerja 102,39%, jika dibandingkan tahun 2020 dengan capaian realisasi sebesar 104,44% dengan capaian kinerja 99,08% yang menunjukkan adanya peningkatan pencapaian dari tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana realisasi target sebesar 70,07 dengan capaian kinerja sebesar 95,83%, artinya terjadi fluktuasi realisasi kinerja dari tahun ke tahun.

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Selama kurun waktu 2018, Nilai Tukar Petani pada umumnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,43 %, hal ini disebabkan kenaikan indeks yang diterima petani (It) lebih besar dibandingkan dengan kenaikan indeks yang dibayar petani (Ib). Indeks yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 4,86 %, sedangkan Indeks yang dibayar petani (Ib) terjadi kenaikan sebesar 3,38 %. Kenaikan NTP terutama disebabkan oleh naiknya NTP pada semua subsektor kecuali Subsektor Hortikultura, dan kenaikan tertinggi terjadi pada subsektor Perkebunan Rakyat yaitu sebesar 4,08 %. Penurunan NTP terjadi pada subsektor Hortikultura dengan penurunan sebesar 2,81 %. Sedangkan pada tahun 2019 target kinerja yang ditetapkan sebesar 105,24 dengan capaian realisasi sebesar 104,44 dan capain kinerja 99,24.

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	2019	6,65	93,01
		2020	6,77	95,49
		2021	6,59	94,14

Capaian Nilai Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Gini	Nilai	2019	0,395	100%
		2020	0,405	97,0%
		2021	0,396	101,02%

Capaian Nilai Tukar Petani Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
-------------------	--------	-------	-------------------	-----------------

	Nilai	2019	2020	2021
Nilai Tukar Petani		104,44	104,44**	108,10
		99,24%	99,08%**	102,39%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	7,66	-	7,23	5,27	7,15	6,65	7,09	6,77	7,00	6,59

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Indeks Gini	0,411	-	0,398	0,398	0,395	0,395	0,393	0,405	0,392	<b>0,396</b>

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1.	Nilai Tukar Petani	104,90	-	105,07	103,53	105,24	104,44	105,41	104,44	105,58	108,10

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun 2021 dengan dengan Standar Nasional/ Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja skala kabupaten dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai pada tahun ini dengan realisasi kinerja pada daerah lain. Perbandingan antara realisasi kinerja Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa daerah lain untuk sasaran strategis **“MENINGKATNYA DERAJAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”** tahun 2021 sebagai berikut :

- Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan :

Untuk perbandingan capaian kinerja persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen) (Persen)		
	2019	2020	2021
Kepulauan Selayar	12,83	12,48	12,45
Bulukumba	7,26	7,10	7,43
Bantaeng	9,03	8,95	9,41
Jeneponto	14,88	14,58	14,28
Takalar	8,70	8,44	8,25
Gowa	7,53	7,38	7,54
Sinjai	9,14	9,00	8,84
Maros	9,89	9,74	9,57
Pangkep	14,06	13,96	14,28
Barru	8,57	8,26	8,68
Bone	10,06	10,68	10,52
Soppeng	7,25	7,59	7,53
Wajo	6,91	6,95	6,46
Sidrap	4,79	5,05	5,04
Pinrang	8,46	8,86	8,81
Enrekang	12,33	12,17	12,47
Luwu	12,78	12,65	12,53
Tana Toraja	12,35	12,10	12,27
Luwu Utara	13,60	13,41	13,59
Luwu Timur	6,98	6,85	6,94
Toraja Utara	12,41	12,01	11,99
Makassar	4,28	4,54	4,82
Pare Pare	5,26	5,44	5,40
Palopo	7,82	7,85	8,14
<b>SULAWESI SELATAN</b>	<b>8,69</b>	<b>8,72</b>	<b>8,78</b>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

## b. Gini Ratio :

Untuk perbandingan capaian kinerja gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan		
	2018	2019	2020
Kepulauan Selayar	0,338	0,301	0,357
Bulukumba	0,354	0,377	0,371
Bantaeng	0,342	0,338	0,344
Jeneponto	0,309	0,331	0,349
Takalar	0,358	0,482	0,360
Gowa	0,384	0,354	0,345
Sinjai	0,369	0,354	0,372
Maros	0,337	0,382	0,368
Pangkep	0,321	0,328	0,345
Barru	0,379	0,360	0,357
Bone	0,412	0,366	0,404
Soppeng	0,359	0,392	0,403
Wajo	0,369	0,347	0,355
Sidrap	0,340	0,284	0,349
Pinrang	0,359	0,336	0,375
Enrekang	0,389	0,359	0,366
Luwu	0,362	0,352	0,396
Tana Toraja	0,369	0,362	0,348
Luwu Utara	0,361	0,364	0,344
Luwu Timur	0,398	0,387	0,405
Toraja Utara	0,410	0,380	0,384
Makassar	0,383	0,390	0,400
Pare Pare	0,382	0,350	0,378
Palopo	0,338	0,338	0,354
SULAWESI SELATAN	0,397	0,389	0,389

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat adalah :**

1. Perubahan rata-rata-rata upah buru per hari yang berkontribusi pada penurunan kemiskinan;
2. Nilai tukar petani yang menurun yang menyebabkan kerugian;
3. Tingkat daya beli masyarakat yang menyebabkan perputaran uang yang fluktuasi.
4. Harga eceran komoditi pokok yang tidak terkontrol
5. Rat-rata pengeluaran perkapita
6. Program bantuan pangang non tunai (BPTN)

Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan oleh lintas perangkat daerah dalam bidangnya masing-masing yang mencakup pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, ketenagakerjaan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahu 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Permendagri Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka akselerasi dan peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 062/II/2018 tanggal 07 Februari 2018, serta Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 198/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019. Tim tersebut mempunyai tugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik lintas sektor maupun lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan.

❖ **Hambatan/masalah :**

Permasalahan-permasalahan yang fokus untuk ditindaklanjuti dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Integrasi program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah;
2. Masih lemahnya koordinasi SKPD dengan TKPK;

3. Program kerja kemiskinan cenderung monoton, kurang improvisasi dan terkesan peran otonomi masih kurang;
4. Sebagian besar program dan kegiatan bersifat bantuan langsung sehingga kurang mendorong kemandirian masyarakat miskin;
5. Optimalisasi pemanfaatan basis data terpadu hasil PPLS yang masih kurang terutama pada SKPD;
6. Masih sulitnya masyarakat miskin dalam mengakses permodalan ke perbankan.

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- ✓ Bahwa dalam rangka sinkronisasi sinergisitas program penanggulangan kemiskinan, maka Kementerian Sosial telah menetapkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu dengan berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait serta menjadikan kriteria tersebut sebagai dasar rujukan dalam menyelenggarakan kegiatan statistik untuk melakukan pendataan.
- ✓ Bahwa data fakir miskin dan orang tidak mampu dikelola oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan teknologi informasi dan dijadikan basis data terpadu (BDT), sehingga seluruh SKPD terkait dalam menetapkan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan agar lebih mengutamakan rumah tangga yang terdaftar pada Basis Data terpadu (BDT);
- ✓ Dalam pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar rujukan sasaran penerima program, agar berkoordinasi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang telah ditetapkan;
- ✓ Bahwa sebagai upaya dalam mendukung ketepatan sasaran integrasi bantuan sosial tersebut dengan melengkapi informasi kependudukan (NIK) bagi sasaran penerima program sehingga akan memudahkan verifikasi dan validasi rumah tangga yang ada pada Basis Data terpadu (BDT);
- ✓ Memperkuat program-program yang pro kepada masyarakat miskin, serta membuat inovasi-inovasi yang didukung kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan optimalisasi berbagai sumber pendanaan;

- ✓ Penanggulangan kemiskinan memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah pusat dan daerah, DPR dan DPRD, Perguruan Tinggi, Organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Internasional dan Swasta (Pemanfaatan Dana CSR) perlu disinergikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Rehabilitasi Sosial
  - Pemberian Jaminan Hidup Bagi PMKS
  - Pembinaan dan Pemantauan Penyandang Penyakit Sosial
  - Pendampingan Bantuan Hukum Bagi PMKS Anak.
- ✓ Program Pemberdayaan Sosial
  - Pemberian Bantuan Usaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi bagi PMKS
  - Pengembangan dan Pemutakhiran Data PMKS
  - Pemantauan, Pembinaan dan Pengelolaan Rastra/BPNT
- ✓ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - Sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan
  - Perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial
  - Perlindungan sosial bagi PMKS lainnya
  - Pembinaan Taruan Siaga Bencana
  - Fasilitasi penanganan dan pemulangan jenazah masyarakat Luwu Timur
- ✓ Program Pengembangan Data dan Informasi
- ✓ Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp.36.350.758.299 dengan realisasi sebesar Rp.30.614.359.873 atau 84,22. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 99,18% berarti tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 15,78%.

### Sasaran Strategis 3

#### Meningkatnya Apresiasi Nilai-Nilai Budaya Yang Mendukung Perekonomian Serta Ketahanan Budaya

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *MENINGKATNYA APRESIASI NILAI-NILAI BUDAYA YANG MENDUKUNG PEREKONOMIAN SERTA KETAHANAN BUDAYA* ” dengan 2(dua) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya	%	85,56 %	80,32 %	93,88 %
2	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	12,24 %	13,96%	114,05 %
Rata-Rata Capaian Kinerja			103,96%		

#### A. Indikator Kinerja “*Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh persentase Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya adalah :

$((\text{Jumlah cagar dan seni budaya yang dilestarikan} / \text{jumlah total cagar dan seni budaya} \times 100\%) + (\text{Jumlah even seni} / \text{jumlah even seni yang ditargetkan} \times 100\%) + (\text{jumlah sanggar seni yang aktif} / \text{jumlah sanggar seni} \times 100\%) + (\text{jumlah pengadaan alat-alat kesenian} / \text{jumlah total target alat-alat kesenian yang direncanakan pengadaannya} \times 100\%)) / 4$

$$\begin{aligned}
 &= (15 / 47 \times 100\%) + (3 / 3 \times 100\%) + (24 / 25 \times 100\%) + (169 / 181 \times 100\%) / 4 \\
 &= 31,91 + 100 + 96 + 93,37 \\
 &= 321,28 / 4 \\
 &= 80,32
 \end{aligned}$$

Seni Budaya lebih dikenal sebagai seni tradisional yang merupakan bentuk seni yang berakar pada lingkungan masyarakat tempat seni itu tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Seni budaya dapat menciptakan dan mendorong rasa kebersamaan antar warga masyarakat.



Corak ragam seni budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur sebanyak 20 kesenian daerah. Ada 46 situs budaya se-Kabupaten Luwu Timur yang telah diinventarisir oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, oleh karena itu untuk tetap menjaga dan melestarikan cagar dan seni budaya yang lebih maju

masyarakat diminta untuk selalu memberikan masukan dan ikut terlibat langsung. Untuk Tahun 2021 Jumlah Total Cagar Seni Budaya yang ada sebanyak 47, sementara cagar dan seni budaya yang dilestarikan sebanyak 15. Kemudian even seni yang ditargetkan sebanyak 3 even an terealisasi sebanyak 3 even, artinya target yang direncanakan dapat dilaksanakan

dengan baik. Untuk sanggar seni yang ada di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 25, tetapi sanggar seni yang aktif 24 sanggar seni, kemudian alat-alat kesenian yang tersedia 169 unit dan direncanakan untuk pengadaan menjadi 181 unit.

Untuk cakupan pelestarian cagar dan seni budaya pada tahun 2021 target kinerja sebesar 85,56%, sedangkan realisasi sebesar 80,32% dengan rata-rata capaian kinerja 93,88%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 0,75% dengan capaian kinerja sebesar 0,88% menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada indikator pelestarian cagar dan seni budaya.

### B. Indikator Kinerja “*Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh persentase Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya adalah :

$$\frac{jml\ pengunjung\ pada\ tahun\ n - jml\ pengunjung\ pada\ tahun\ n - 1}{jml\ pengunjung\ pada\ tahun\ n - 1} \times 100\%$$

$$= \frac{36.990 - 32.457}{32.457} \times 100\%$$

$$= 13,96$$



Festival kebudayaan daerah dirayakan oleh masyarakat dan berpusat pada beberapa aspek karakteristik masyarakat dan agama atau tradisi dari suatu daerah. Pada tahun 2019 dilaksanakan 2 kegiatan festival kebudayaan daerah dengan jumlah seluruh pengunjung sebanyak 32.950 orang pengunjung dengan target pengunjung

sebanyak 24.500 orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pengunjung festival seni dan budaya tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan festival seni dan budaya ini merupakan kegiatan yang berskala nasional sehingga menarik para pengunjung baik dari dalam daerah maupun luar daerah. Sedangkan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19 festival kebudayaan tidak dapat diselenggarakan. Untuk Jumlah kunjungan wisata tahun 2020 sebanyak 32.457 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 32.950 mengalami penurunan sebesar 493 pengunjung atau sebesar 1, 10%.

Untuk Indikator Kinerja pertumbuhan kunjungan wisatawan pada tahun 2020 target kinerja sebesar 12,24%, sedangkan realisasi sebesar 32,45 % dengan rata-rata capaian kinerja 265,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2019 sebesar 0,09% dengan capaian kinerja sebesar 0,79% menunjukkan adanya peningkatan pada indikator kinerja

pertumbuhan kunjungan wisatawan. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya	%	2019	0,75	0,88%
		2020	80,32	93,88%
		2021	80,32	93,88 %

Capaian Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	2019	0,09	0,79
		2020	32,45	265,11
		2021	13,96	114,05

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Cakupan Pelestarian Cagar dan Seni Budaya	84,15	-	84,15	0,77	84,86	0,75	85,56	80,32	85,56	80,32

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	8,11	-	10,00	0,77	11,36	0,09	12,24	32,45	12,24	13,96

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada pencapaian sasaran:**

- ✓ Adanya pengembangan pemasaran pariwisata yang lebih luas
- ✓ Pengembangan destinasi pariwisata
- ✓ Promosi pariwisata

❖ **Hambatan/Masalah yang dihadapi dalam pencapaian sasaran :**

- ✓ Belum ada regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebudayaan dan kepariwisataan di Luwu Timur
- ✓ Masih kurangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya
- ✓ Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian budaya
- ✓ Ketebatasan kemampuan pendanaan.
- ✓ Masih kurangnya kemitraan/investor dalam bidang kepariwisataan

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- ✓ Penetapan regulasi yang jelas tentang peraturan perundang-undangan terkait kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Luwu Timur
- ✓ Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya yang ada di Luwu Timur
- ✓ Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan dan kepariwisataan di Luwu Timur.
- ✓ Peningkatan Dana/Anggaran yang cukup untuk kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pengembangan Kebudayaan
  - Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
  - Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
  - Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
  - Pengembangan Keragaman Budaya Daerah

- Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
- Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
- ✓ Program Pengembangan Kesenian Tradisional
  - Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
  - Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
  - Pengembangan Keragaman Budaya Daerah
  - Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
  - Pengadaan Alat-Alat Kesenian
- ✓ Program Pengembangan Kesenian Tradisional
  - Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten
- ✓ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- ✓ Program Pemasaran Pariwisata
  - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- ✓ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp.4.022.374.855 dengan realisasi sebesar Rp. Rp.3.680.163.983,68 atau 91,43%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 103,96% berarti tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 8,51%.

## Sasaran Strategis 4

## Terpeliharanya Keamanan Wilayah dan Ketertiban Umum

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*TERPELIHARANYA KEAMANAN WILAYAH DAN KETERTIBAN UMUM*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Kinerja Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	96,67%	93,51%	96,73
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>96,73%</b>		

A. Indikator Kinerja “***Cakupan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum***”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh persentase cakupan kinerja ketentraman dan ketertiban umum adalah :

$$\begin{aligned}
 & ((\text{Jumlah gangguan K3 yang tertangani} / \text{jumlah gangguan K3 keseluruhan yang} \\
 & \text{terlaporkan/teridentifikasi} \times 100\%) + (\text{jumlah bencana kebakaran yang ditangani dalam} \\
 & \text{waktu tanggap} / \text{jumlah kebakaran} \times 100\%) + (\text{jumlah pelanggaran perda yang} \\
 & \text{terselesaikan} / \text{jumlah pelanggaran perda yang terlaporkan/teridentifikasi} \times 100\%)) / 3 \\
 & = (459 / 459 \times 100\%) + (58 / 72 \times 100\%) + (1036 / 1037 \times 100\%) / 3 \\
 & = (100) + (80,55) + (100) / 3 \\
 & = 280,55 / 3 \\
 & = 93,51
 \end{aligned}$$



Untuk indikator kinerja cakupan kinerja ketentraman dan ketertiban pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 96,67% terhadap pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan wilayah dan terealisasi sebesar 93,51% dengan capaian kinerja 96,73%. Jika dibandingkan antara realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 91,92 dengan Capaian kinerja sebesar 95,09%, menunjukkan adanya peningkatan pemeliharaan

keamanan wilayah dan ketertiban umum pada tahun 2021. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Cakupan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	2020	91,92	95,09%
		2021	93,51	96,73%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	201		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Cakupan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum	74,29	-	75,04	-	92,17	-	96,97	91,92	96,97	93,92

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Adanya penugasan personil Satpol PP yang disebar di setiap kecamatan  
Dengan adanya petugas Satpol PP disetiap kecamatan yang melaksanakan tugas patroli rutin setiap hari, sehingga faktor geografis (rentan kendali) dalam penanganan gangguan dapat teratasi dengan cepat dan dampak gangguan yang lebih luas dapat dicegah.
- ✓ Pembentukan peleton PRC ( Patroli Reaksi Cepat).  
Dengan adanya PRC yang selalu siap siaga, sehingga begitu mendapat laporan gangguan trantibum dapat segera ditindaklanjuti. Selain siaga, PRC ini juga aktif melakukan patroli siang dan malam untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
- ✓ PPNS Satpol  
Peran PPNS sangat besar dalam penyelesaian kasus penegakan perda, beberapa kasus yang diselesaikan secara yustisi selain dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar juga mendatangkan PAD.

❖ **Hambatan/masalah :**

- ✓ Sarana dan prasarana patroli Satpol PP kecamatan saat ini menumpang dikantor camat setempat, oleh karena itu untuk mendukung kinerja yang lebih maksimal agar disediakan posko trantibum sendiri . Selain fasilitasi posko juga tidak kalah pentingnya adalah fasilitasi mobil patroli disetiap kecamatan sehingga lebih memudahkan mobilisasi anggota dilapangan dalam melaksanakan tugas dan tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi.
- ✓ Kompetensi Aparatur Satpol PP, Penempatan personil Satpol PP dikecamatan adalah tenaga bantu (Upahjasa) hanya didampingi oleh 1(satu) orang PNS Satpol PP sebagai koordinator yang memiliki kompetensi yang masih terbatas terutama dalam hal pemahaman aturan dan cara berkomunikasi yang efektif dengan masyarakat.
- ✓ Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah, alasan ketidaktahuan dan tidak pernah dilakukan sosialisasi seringkali menjadi alasan warga masyarakat melakukan pelanggaran peraturan daerah.
- ✓ Peran dan keterlibatan Satlinmas masih dianggap belum penting, beberapa desa masih menganggap peran satlinmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat masih dianggap tidak penting sehingga kurang perhatian.

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- ✓ Melakukan koordinasi kepada TAPD dan DPRD agar lebih memperhatikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan urusan trantibumlinmas yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dengan adanya dukungan anggaran yang memadai dapat dilakukan pengadaan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan standar pelayanan.
- ✓ Meningkatkan kompetensi dan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan , bimbingan teknis dan sosialisasi aturan perda kepada seluruh personil. Adapun kompetensi utama yang menjadi prioritas adalah pemahaman aturan dan kemampuan pecara individu.
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan OPD pengampu perda agar lebih intens dalam melakukan sosialisasi perda.
- ✓ Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terkait keterlibatan Satlinmas dalam pelaksanaan tugasnya dan melakukan koordinasi dengan kepala desa.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
  - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota
    - a. Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
    - b. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massal;
    - c. Koordinansi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota;
    - d. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
    - e. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia;

- f. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
- g. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara;
- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
  - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - b. Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
  - c. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
  - a. Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS
- ✓ Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
  - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
    - b. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran
    - c. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
    - d. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
    - e. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
  - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
    - a. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
    - b. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran
  - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
    - a. Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp.10.893.338.641 dengan realisasi sebesar Rp.10.698.601.072 atau 98,21%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 96,73% berarti tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,79%.

Misi Kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mendorong Peningkatan Investasi Daerah**”. Untuk mencapai misi 2, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi penanaman modal.

#### Sasaran Strategis 5

#### Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Investasi	Juta (Rp)	651.100.000.000	4.171.740.000.000	640,72%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>640,72%</b>		

#### A. Indikator Kinerja “*Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh nilai Investasi) adalah:

#### **Akumulasi Investasi PMA dan PMDN pada tahun n dimana kurs 1 dollar = 13.100 rupiah**

Jumlah investor PMDN pada tahun 2021 sebanyak 46 investor, Jika dibandingkan dengan Jumlah investor tahun 2020 sebanyak 21 investor terjadi fluktuasi dan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan untuk jumlah investor PMA Pada Tahun 2021 sebanyak 5 investor, jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebanyak 3 investor dan Tahun 2019 sebanyak 3 investor, terjadi peningkatan jumlah investor di Kabupaten Luwu Timur.

Untuk nilai investasi pada tahun 2021 dengan target kinerja sebesar 651.100.000.000 dan realisasi kinerja sebesar 4.171.740.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 640,72%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 3.822.080.000.000 dengan capaian kinerja sebesar 615,42%, menunjukkan adanya pertumbuhan nilai investasi yang sangat signifikan. Untuk itu hal ini perlu disikapi melalui kebijakan-kebijakan serta peningkatan pelayanan dan inovasi daerah guna menarik minat para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi di daerah ini. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Rupiah Nilai Investasi Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Nilai Investasi	Juta (Rp)	2019	1.147.817	190,89%
		2020	3.822.080	615,42%
		2021	4.171.740.000.000	640,72%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Investasi	551.400.	-	580.950	721.802	601.000	1.147.817	621.050	3.822.080	651.100	4.171.740

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran indikator:**

- ✓ Adanya komitmen pimpinan dan aparatur dalam pencapaian peningkatan investasi.
- ✓ Meningkatnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan kegiatan penanaman modal (LKPM).
- ✓ Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal
- ✓ Pelayanan perizinan sudah terintegrasi dalam OSS (Online Single Submission) sehingga memudahkan pelayanan dan pendataan jumlah izin yang terbit setiap waktu

- ✓ Promosi investasi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif melalui berbagai media.
- ❖ **Hambatan/masalah :**
  - ✓ Belum semua pengusaha menyampaikan LKPM sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PMA/PMDN yang mengakibatkan perkembangan realisasi investasi belum diketahui secara pasti.
  - ✓ Keterbatasan jumlah SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.
  - ✓ Dukungan anggaran pada program dan kegiatan belum optimal sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal.
  - ✓ Proyek yang ditawarkan belum didukung oleh pemberian insentif dari daerah.
- ❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**
  - ✓ Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang komprehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
  - ✓ Adanya penyesuaian dan harmonisasi regulasi di tingkat kabupaten dengan tingkat yang lebih diatas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada;
  - ✓ Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
  - ✓ Optimalisasi dukungan anggaran pada program;
  - ✓ Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
  - ✓ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
      - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
      - b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
  - ✓ Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp.345.826.575 dengan realisasi sebesar Rp.339.400.707 atau 98,14%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 640,72% berarti tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,86%.

Misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Memanfaatkan Ruang Sesuai Dengan Tata Ruang Wilayah Untuk Menjamin Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**” dengan tujuan “**Mewujudkan Tata Ruang Yang Ramah Lingkungan**”. Untuk mencapai misi 3, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

### Sasaran Strategis 6

#### Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Kinerja Penataan Ruang	%	6,76%	27,42%	405,62%
Rata-Rata Capaian Kinerja			405,62%		

#### A. Indikator Kinerja “*Cakupan Kinerja Penataan Ruang*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh realisasi persentase Cakupan Kinerja Penataan Ruang adalah :

**(Jumlah Luas Wilayah Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW / Luas Wilayah Kabupaten x 100%) + (Jumlah Rumah Tinggal ber-IMB / Jumlah Total Rumah x 100%) / 2**

**= (276.393 / 694.488 x 100%) + (5.413 / 35.930 x 100%) / 2**

**= (39,79) + (15,06) / 2**

**= 27,42**

Indikator persentase Cakupan Kinerja Penataan Ruang pada tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 6,76% dan terealisasi sebesar 27,42% dengan capaian kinerja 405,62%, menunjukkan keberhasilan pencapaian target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana realisasi kinerja sebesar 11,59% dengan capaian kinerja sebesar 175,34%, menunjukkan adanya peningkatan yang besar pada cakupan kinerja penataan ruang tahun 2021. Capaian tersebut dapat diukur dari jumlah luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW dibagi dengan Luas Wilayah Kabupaten dikalikan dengan 100%, kemudian ditambahkan dengan jumlah rumah tinggal ber-IMB dibagi jumlah total rumah kali 100% dibagi 2. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur.

Capaian kinerja penataan ruang untuk dapat dilihat pada diagram berikut :

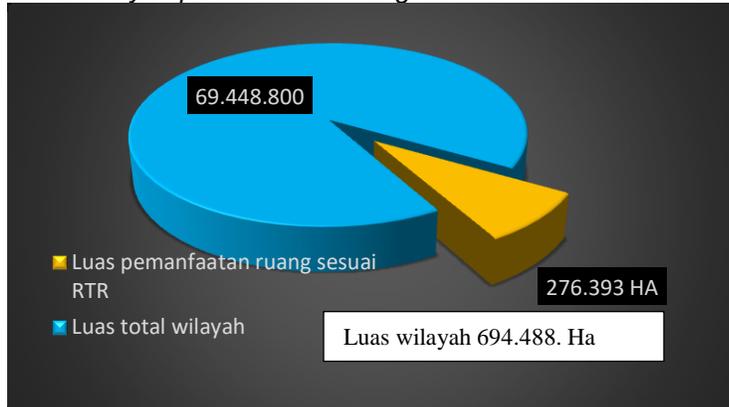
*Diagram VI.1  
Cakupan kinerja penataan ruang Tahun 2021*



*Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Penataan Ruang Tahun 2021*

Diagram VI.2

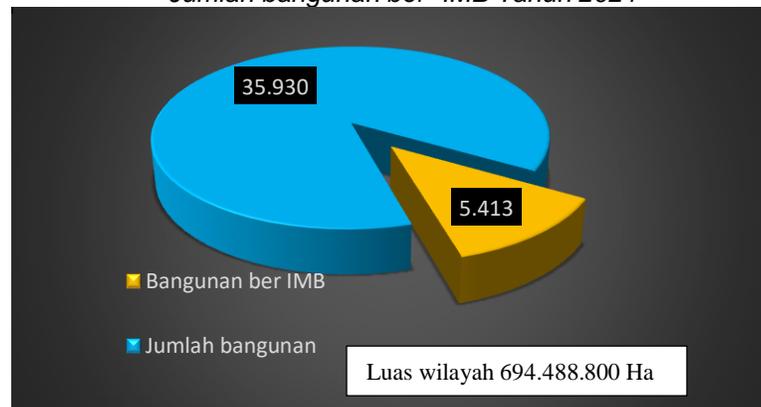
Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Penataan Ruang Tahun 2021

Diagram VI.3

Jumlah bangunan ber- IMB Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Penataan Ruang Tahun 2021

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Cakupan Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi	Capaian
Cakupan Kinerja Penataan Ruang	%	2020	11,59%	175,34%
		2021	27,42%	405,62%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2020	
		Target	Realisasi								
1	Cakupan Kinerja Penataan Ruang	6,31	-	6,39	-	6,46	0,125	6,61	11,59	6,76%	27,42%

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Dukungan anggaran yang bersumber dari DAK.

- ❖ **Hambatan/masalah :**

- ✓ Perbup RDTR Kecamatan Malili dan Kecamatan Wotu telah diklinik di Kementerian ATR/BPN, namun sampai saat ini belum ada hasilnya dari Kementerian.
- ✓ Lambatnya Proses Pengadaan Barang dan Jasa
- ✓ Adanya bencana terputusnya jembatan trans sulawesi kota palopo sehingga menghambat distribusi material dan alat pada saat itu.

- ❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- ✓ Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar dilakukan percepatan pembahasan perbup RDTR.
- ✓ Percepatan proses pelaksanaan Barang dan Jasa.

- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota;
  - b. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang.
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp.1.786.610.723 dengan realisasi sebesar Rp.1.590.271.700 atau 89,01%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 405,62% berarti tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 10,99%.

## Sasaran Strategis 7

## Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA PENGELOLAAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah	%	60,39%	84,07%	139,21%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>139,21%</b>		

A. Indikator Kinerja “*Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh persentase indeks kualitas lingkungan hidup daerah adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLDH} &= (\text{Indeks Pencemaran Air} \times 30\%) + (\text{Indeks Pencemaran Udara} \times 30\%) + \\
 &\quad (\text{Indeks Tutupan Hutan} \times 40\%) \\
 &= (80,69 \times 30\%) + (97,62 \times 30\%) + (76,48 \times 40\%) \\
 &= (24,20) + (29,28) + (30,592) \\
 &= 84,07
 \end{aligned}$$



Untuk target kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sebesar 60,39 % dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLDH) dan terealisasi sebesar 84,07% dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 139,21%. Jika dibandingkan antara tahun 2020 dimana realisasi kinerja sebesar 87,55% dengan capaian kinerja 146,63% berarti terjadi

penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Luwu Timur, namun masih tetap berada dalam posisi baik, artinya terjadi fluktuasi capaian dari tahun ke tahun terhadap realisas kinerja serta capaian kinerja pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Luwu Timur. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian IKLHD Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	%	2019	72,88	72,88%
		2020	87,55	146,63%
		2021	84,07	139,21%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	56,99	57,00	58,35	58,36	59,03	72,88	59,71	87,55	60,39	84,07

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

Salah satu tujuan dilaksanakannya penataa ruang adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara terukur dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam aspek lingkungan hidup adalah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup antara lain disebabkan oleh tingkat akurasi dan hasil analisis data lingkungan, kurangnya pengawasan terhadap usaha dan kegiatan masyarakat yang terkait lingkungan hidup sehingga pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan baik dan benar, melihat di Kabupaten Luwu Timur banyak kegiatan/usaha yang beroperasi yang dapat merusak lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran yang meliputi air, udara, tanah, pengelolaan sampah dan LB3 (limbah bahan berbahaya dan beracun) yang bersumber dari berbagai bentuk kegiatan usaha harus menjadi prioritas untuk dilakukan penanganan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pencapaian target tahun 2020 berdasarkan realisasi anggaran, salah satu faktor penyebab keberhasilan pencapaian target adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah memadai, alokasi anggaran yang cukup, kemudian telah dilakukan monev penataan lingkungan.

❖ **Hambatan/masalah :**

- ✓ Terbatasnya kegiatan yang mengharuskan pembinaan langsung ke lapangan.
- ✓ Masih Kurangnya personil Pengawas Lingkungan Hidup.
- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kondisi lingkungan hidup.

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- ✓ Peningkatan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun pemilik badan usaha yang berpotensi merusak lingkungan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dari kerusakan
- ✓ Penambahan Personil Pengawas Lingkungan Hidup
- ✓ Melakukan koordinasi dengan sektor terkait

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.
- ✓ Program Pengelolaan Persampahan
  - Kegiatan Pengelolaan Sampah
    - a. Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
    - c. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
- ✓ Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
  - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
    - b. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan rencana PPLH.

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp.3.803.288.168 dengan realisasi sebesar Rp.3.768.491.411 atau 99,09%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 139,21% berarti tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 0,91%.

Misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dalam Mencapai Kualitas Manusia Yang Tinggi**” dengan tujuan “**Meningkatkan Derajat Pendidikan Dan Kemampuan Literasi Masyarakat**” dan “**Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Kualitas Keluarga**”. Untuk mencapai misi 4, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidang Pendidikan dan Kesehatan.

#### Sasaran Strategis 8

#### Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN*” dengan 4(empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,83	8,81	99,77%
2.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,16	70,63	100,67%
3.	Angka Melek Huruf	%	99,77	99,41	99,64%
4.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,83	12,84	100,08%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>100,04%</b>		

#### A. Indikator Kinerja “*Angka Rata-Rata Lama Sekolah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah :

$$\begin{aligned}
 RLS &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk} \\
 &= 8,81
 \end{aligned}$$



Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15-24 tahun untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Perhitungan lama sekolah untuk mereka yang tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan tamat SMA adalah 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.



Untuk indeks pendidikan, pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur ditargetkan sebesar 8,83 dan terealisasi sebesar 8,81 dengan capaian kinerja sebesar 99,77%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 8,80 dengan capaian kinerja 99,66%, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur.

### B. Indikator Kinerja “*Angka Harapan Hidup*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Angka Harapan Hidup adalah :

#### **Angka Perkiraan Lama Hidup Rata-Rata Penduduk Dengan Asumsi Tidak Ada Perubahan Pola Mortalitas Menurut Umur**



Angka harapan hidup pada suatu umur eks adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani seseorang yang telah berhasil mencapai umur pada suatu tahun-tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. Selama kurun waktu 2013 s.d 2021 angka harapan hidup di Kabupaten Luwu Timur terus meningkat artinya harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Untuk tahun 2021 angka harapan hidup ditargetkan sebesar 70,16 dan realisasi kinerja sebesar 70,63 dengan capaian kinerja sebesar 100,67% . Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 70.53 dengan capaian kinerja 100,23, menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja sebesar (0,13) pada tingkat angka harapan hidup.

### C. Indikator Kinerja “*Angka Melek Huruf*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Angka Melek Huruf adalah :

$$LIT^t = \frac{L}{P} + \frac{15+}{15+} \times 100\%$$



Angka melek huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Angka partisipasi sekolah adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Pada Tahun 2021 Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur ditargetkan sebesar 99,77% dengan realisasi kinerja sebesar 99,41% dengan capaian kinerja sebesar 99,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 95,30 dengan capaian kinerja sebesar 95,52 %, dan untuk tahun 2019 dimana realisasi kinerja sebesar 95,72 dengan capaian kinerja sebesar 95,96. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pada capaian ini, dari tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar (0,44). Dan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar (4,12) dari tahun 2020.

#### D. Indikator Kinerja “*Angka Harapan Lama Sekolah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Angka Harapan Lama Sekolah adalah :

$$HLS^t = FK \times \sum_{i=a}^n \left( \frac{Et}{Pt} \right)$$

Didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 dengan target kinerja sebesar 12,83 dan realisasi kinerja sebesar 12,84 serta capaian kinerja sebesar 100,08%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 12,83 dengan capaian kinerja sebesar 100,00%, artinya ada peningkatan (1) angka harapan lama sekolah pada tahun 2021. Secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,84 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 12,83 dengan capaian kinerja sebesar 100,00%, artinya angka harapan lama sekolah setiap tahun mengalami peningkatan. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur.

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	2019	8,54	98,84%
		2020	8,80	99,66%
		2021	8,81	99,77%

Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Angka Harapan Hidup	Tahun	2019	70,03	100,07%
		2020	70,53	100,23%
		2021	70,63	100,67%

Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Angka Melek Huruf	(%)	2019	95,72	95,96
		2020	95,30	95,52
		2021	99,41	99,64

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	2019	12,82	100,00%
		2020	12,83	100,00%
		2021	12,84	100,08%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,20	8,20	8,45	8,40	8,64	8,54	8,83	8,80	8,83	8,81

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Angka Harapan Hidup	69,80	69,79	69,68	69,90	69,98	70,38	70,07	70,53	70,16	70,63

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Angka Melek Huruf	94,46	-	99,74	-	99,75	95,72	99,77	95,30	99,77	99,41

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,79	-	12,81	-	12,82	12,82	12,83	12,83	12,83	12,84

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun 2021 dengan dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja skala kabupaten dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai paa tahun ini dengan realisasi kinerja pada daerah lain. Perbandingan antara realisasi kinerja Kabupaten Luwu Timur dengan

beberapa daerah lain untuk sasaran strategis **“MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN”** tahun 2021 sebagai berikut :

a. Capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah :

Untuk perbandingan keberhasilan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)		
	2019	2020	2021
Kepulauan Selayar	7,63	7,88	8,08
Bulukumba	7,43	7,67	7,82
Bantaeng	6,48	6,72	6,77
Jeneponto	6,48	6,59	6,60
Takalar	7,18	7,29	7,49
Gowa	7,97	8,19	8,20
Sinjai	7,48	7,75	7,78
Maros	7,46	7,73	8,01
Pangkajene dan Kepulauan	7,60	7,66	7,92
Barru	7,96	8,23	8,24
Bone	6,98	7,15	7,23
Soppeng	7,74	7,81	7,82
Wajo	6,80	6,81	7,05
Sindereng Rappang	7,83	7,84	7,94
Pinrang	7,85	7,86	7,87
Enrekang	8,89	8,90	8,91
Luwu	8,15	8,24	8,35
Tana Toraja	8,02	8,26	8,51
Luwu Utara	7,78	7,79	7,86
Luwu Timur	8,54	8,80	8,81
Toraja Utara	7,92	7,96	8,25
Makassar	11,20	11,21	11,43
Parepare	10,30	10,45	10,65
Palopo	10,75	10,76	10,94
Sulawesi Selatan	8,26	8,38	8,46

Sumber Data BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

## b. Capaian Angka Harapan Hidup :

Untuk perbandingan keberhasilan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Wilayah	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)		
	2019	2020	2021
Kepulauan Selayar	68,34	68,46	68,52
Bulukumba	67,69	67,92	68,10
Bantaeng	70,42	70,54	70,60
Jeneponto	66,24	66,39	66,49
Takalar	67,01	67,18	67,30
Gowa	70,37	70,43	70,45
Sinjai	67,17	67,30	67,38
Maros	68,98	69,02	69,04
Pangkajene dan Kepulauan	66,49	66,66	66,78
Barru	68,91	69,02	69,07
Bone	66,88	67,07	67,21
Soppeng	69,43	69,65	69,81
Wajo	67,17	67,35	67,48
Sindereng Rappang	69,59	69,83	70,01
Pinrang	69,39	69,61	69,77
Enrekang	70,83	70,91	70,93
Luwu	70,19	70,34	70,44
Tana Toraja	73,15	73,30	73,40
Luwu Utara	68,31	68,51	68,67
Luwu Timur	70,38	70,53	70,63
Toraja Utara	73,35	73,39	73,41
Makassar	72,00	72,09	72,13
Parepare	71,18	71,27	71,31
Palopo	70,79	70,88	70,92
Sulawesi Selatan	70,43	70,57	70,66

Sumber Data BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

c. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah :

Untuk perbandingan keberhasilan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)		
	2019	2020	2021
Kepulauan Selayar	12,48	12,65	12,66
Bulukumba	12,91	13,17	13,41
Bantaeng	12,03	12,04	12,05
Jeneponto	11,97	11,98	12,10
Takalar	12,25	12,41	12,42
Gowa	13,48	13,64	13,65
Sinjai	12,87	13,05	13,06
Maros	13,02	13,04	13,16
Pangkajene dan Kepulauan	12,51	12,76	12,77
Barru	13,57	13,58	13,59
Bone	12,80	12,88	12,98
Soppeng	12,73	12,90	13,05
Wejo	13,13	13,14	13,15
Sindereng Rappang	12,93	12,94	12,95
Pinrang	13,22	13,23	13,24
Enrekang	13,69	13,70	13,71
Luwu	13,32	13,33	13,39
Tana Toraja	13,58	13,80	13,86
Luwu Utara	12,42	12,43	12,57
Luwu Timur	12,82	12,83	12,84
Toraja Utara	13,37	13,38	13,39
Makassar	15,56	15,57	15,58
Parepare	14,49	14,50	14,51
Palopo	15,07	15,08	15,09
Sulawesi Selatan	13,36	13,45	13,52

Sumber Data BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran:**

- ✓ Indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf yang tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini dipengaruhi oleh karena masih belum adanya regulasi untuk mewajibkan wajib belajar usia PAUD serta masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD.
- ✓ Indikator Angka harapan hidup mencapai target dipengaruhi oleh :
  - Semakin meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan
  - Pelaksanaan kegiatan sweeping K4 yang dilaksanakan oleh bidan desa
  - Penguatan sistem rujukan terpadu
  - Penyediaan rumah tunggu kelahiran yang berada di wilayah kerja Puskesmas Wotu sebagai RTK Kabupaten, RTK Puskesmas Bantilang, RTK Puskesmas Parumpanai, RTK Puskesmas Angkona, RTK Puskesmas Mangkutana
  - Pelaksanaan skrining Covid-19 pada ibu hamil yang mendekati waktu persalinan
  - Pelaksanaan kegiatan kesehatan reproduksi dengan sasaran para calon pengantin, dimana calon pengantin akan diberikan penyuluhan tentang persiapan konsepsi (kehamilan)
  - Semakin meningkatnya kesadaran ibu hamil tentang pentingnya mempersiapkan kehamilan sejak dini.
  - Adanya kegiatan kelas ibu balita, dimana pada kelas tersebut para ibu balita diberikan penyuluhan terkait peningkatan gizi anak balita seperti demo masak membuat PMT yang sehat.
  - Adanya kegiatan pemberian PMT penyuluhan dan pemantauan pertumbuhan bayi balita di posyandu setiap bulannya.
  - Pemberian makanan tambahan bagi bayi balita kurus
  - Semakin meningkatnya masyarakat yang mau, mampu dan sadar untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (ber-PHBS)
  - Tersedianya tenaga terlatih dalam skrining kesehatan usila/ lansia
  - Tersedianya sarana dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan kesehatan para lansia
  - Tersedianya Posyandu Lansia di semua desa/ kelurahan

❖ **Hambatan/masalah :**

- ✓ Adanya Perubahan-Perubahan Regulasi terkait Pendidikan
- ✓ Adanya Pandemi Covid yang menyebabkan beberapa Kegiatan tidak terlaksana
- ✓ Adanya kehamilan yang tidak diinginkan dan dirahasiakan sehingga ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya
- ✓ Adanya beberapa ibu hamil yang bersalin diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur sehingga bayi baru lahir tersebut sulit untuk dipantau
- ✓ Belum maksimalnya pelaksanaan Perda tentang larangan merokok, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di area perkantoran
- ✓ kegiatan di sekolah tidak dilaksanakan karena adanya pandemi Covid-19
- ✓ tidak dilaksanakan kegiatan posyandu lansia karena adanya pandemi Covid-19

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- ✓ Perbaikan dan peningkatan serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan
- ✓ Peningkatan kualitas dan kuantitas serta distribusi sdm kesehatan di sarana pelayanan kesehatan
- ✓ Perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat
- ✓ Perbaikan kualitas lingkungan.
- ✓ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dimasyarakat
- ✓ Peningkatan kesehatan ibu dan anak
- ✓ Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
- ✓ Meningkatkan cakupan imunisasi dasar, imunisasi lanjutan dan imunisasi BIAS
- ✓ Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sesuai kebutuhan
- ✓ Perlunya diadakan Sosialisasi akan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimasyarakat
- ✓ Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara efektif dan efisien

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
  - Pembangunan gedung sekolah
  - Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

- Penambahan ruang kelas sekolah
- Penambahan ruang guru sekolah
- Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
- Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
- Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
- Pembangunan ruang ibadah
- Pembangunan perpustakaan sekolah
- Pembangunan sarana air bersih dan sanitari
- Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
- Pengadaan meubiler sekolah
- Pengadaan perlengkapan sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
- Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
- Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
- Pembangunan pagar sekolah
- Pelaksanaan Ujian Sekolah dan ujian Nasional
- Pelayanan Bantuan Operasional Sekolah Pendamping
- ✓ Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
  - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja
- ✓ Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Upaya Pelayanan Kesehatan Sekolah
  - Pengembangan Masyarakat Pola Hidup Sehat
  - Peningkatan Upaya Pemberdayaan Masyarakat
- ✓ Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat
- ✓ Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
  - Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
- ✓ Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
  - Peningkatan Surveilans Gizi Masyarakat

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp.55.147.000.259 dengan realisasi sebesar Rp.54.245.165.683 atau 98,36%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100,04% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,64%.

Misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Serta Sarana dan Prasarana Wilayah Untuk Menunjang Percepatan Pembangunan Daerah**” dengan tujuan “**Menguatkan Dukungan Infrastruktur Wilayah Bagi Intekoneksitas Dan Pergerakan Antar Wilayah**” dan “**Menguatkan Dukungan Infrastruktur Energi, Sumberdaya Air Dan Kelayakan Huni Perumahan/Permukiman**”. Untuk mencapai misi 5, ditetapkan 1(satu) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

### Sasaran Strategis 9

#### Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Daerah

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*TERPENUHINYA KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DAERAH*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	58,71	65,54	111,63%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>111,63%</b>		

#### A. Indikator Kinerja “*Indeks Pembangunan Infrastruktur*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh nilai Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah :

**((Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / panjang seluruh jalan kabupaten x 90% + Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik / jumlah total jembatan kabupaten x 10%) + (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik / luas irigasi kabupaten x 40% + Panjang saluran irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Panjang seluruh saluran irigasi**

kabupaten x 35% + Panjang sungai kabupaten dalam kondisi baik / panjang total sungai  
 x 20% + Panjang pantai kabupaten dalam kondisi baik / panjang total pantai x 5%) +  
 (Jumlah Penduduk berakses air minum / jumlah penduduk x 40% + Jumlah rumah  
 tinggal bersanitasi / jumlah rumah tinggal x 15% + Jumlah bangunan dalam kondisi  
 baik / jumlah bangunan x 45%) + (Luas areal permukiman tertata / luas areal  
 permukiman keseluruhan x 35% + Luas permukiman kumuh yang ditangani / luas  
 permukiman kumuh yang seharusnya ditangani x 35% + Jumlah rumah layak huni /  
 jumlah total rumah x 30%) + (Jumlah perlengkapan jalan yang ada / jumlah  
 perlengkapan jalan yang seharusnya ada x 100% + Jumlah prasarana perhubungan  
 yang ada / jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada x 100%) / 2 + (Jumlah  
 cakupan koneksi internet pada desa dan kelurahan / jumlah desa dan kelurahan x  
 100%) + Jumlah cakupan koneksi internet pada ruang publik / jumlah ruang publik x  
 100% + Jumlah cakupan koneksi internet pada OPD / Jumlah OPD x 100%) / 3)) / 6

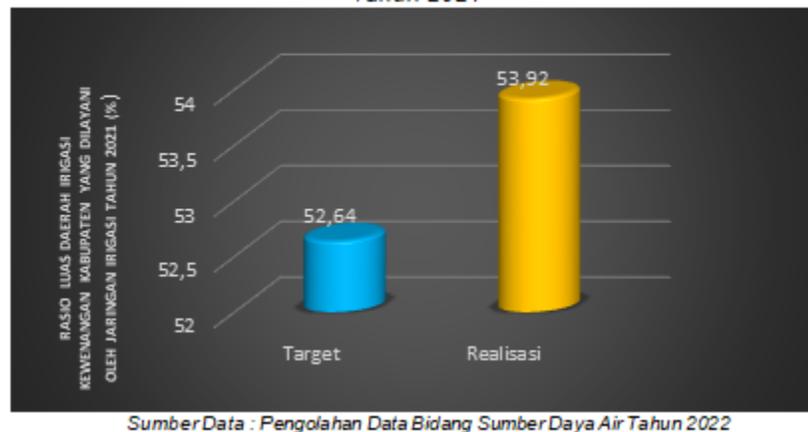


Capaian indikator kinerja pada Indeks  
 Pembangunan Infrastruktur untuk tahun 2021 dari  
 target kinerja sebesar 58,71 dan realisasi kinerja  
 sebesar 65,54 dengan capaian kinerja 111,63%.  
 Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana  
 realisasi kinerja sebesar 52,45 dan capaian kinerja  
 sebesar 90,51, menunjukkan adanya peningkatan  
 nilai indeks pembangunan infrastruktur Kabupaten  
 Luwu Timur yang sangat signifikan untuk tahun  
 2021. Data pendukung pada indikator ini  
 bersumber dari urusan yang membidang  
 Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan  
 Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan  
 Informatika.

Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 dapat digambarkan melalui diagram berikut :



**Diagram III.1**  
*Luas Daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Tahun 2021*



**Diagram III.2**  
*Luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Tahun 2021*

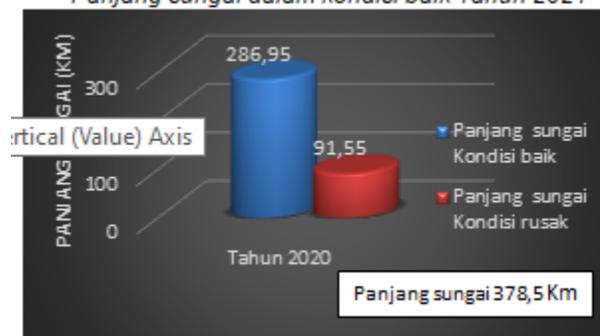


Diagram III.3  
Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Tahun 2022

Diagram III.4  
Panjang sungai dalam kondisi baik Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Tahun 2022

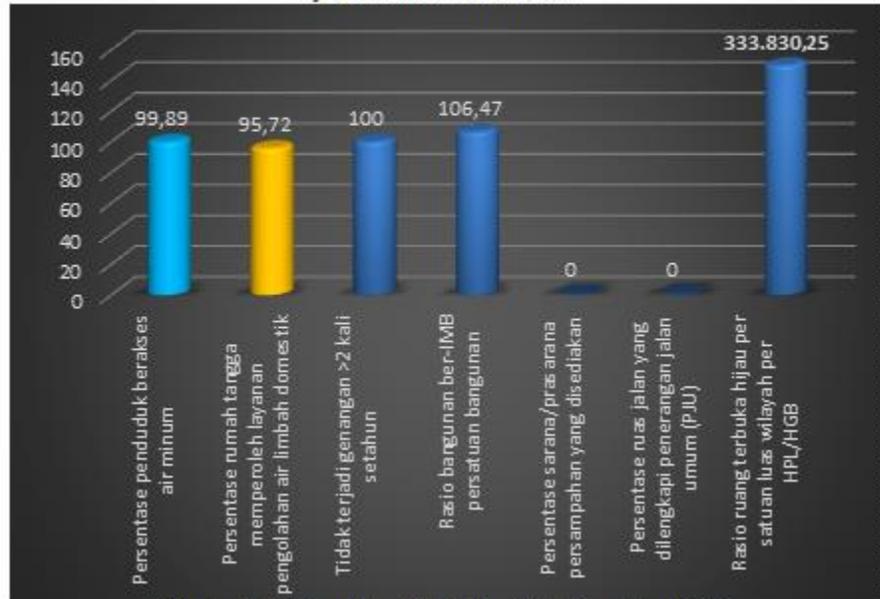
Diagram III.5  
Panjang pantai kondisi baik Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Sumber Daya Air Tahun 2022

Diagram III.6

Cakupan indikator sasaran Meningkatkan layanan keciptakaryaan: air minum, sanitasi, drainase, IMB dan bangunan/lingkungan, persampahan dan penerangan jalan umum Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2022

Diagram III.7

Jumlah Penduduk (Jiwa) berakses air Minum Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Cipta Karya Tahun 2022

Diagram III.8  
Jumlah rumah tinggal bersanitasi Tahun 2021

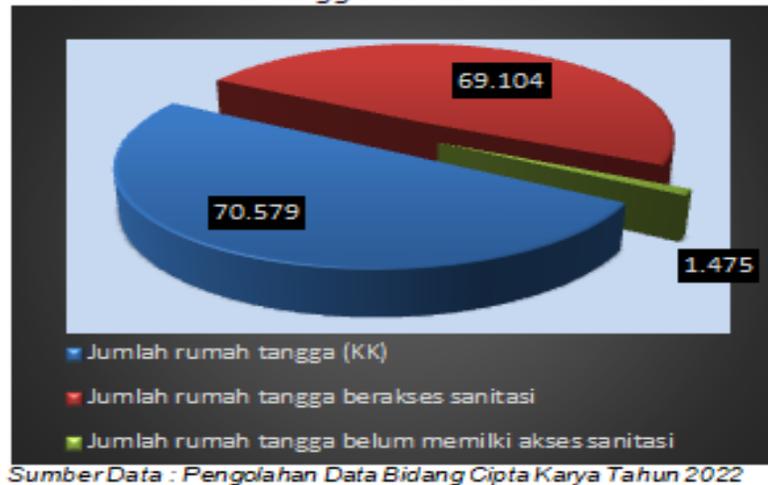


Diagram III.9  
Jumlah gedung/kantor kondisi baik Tahun 2021

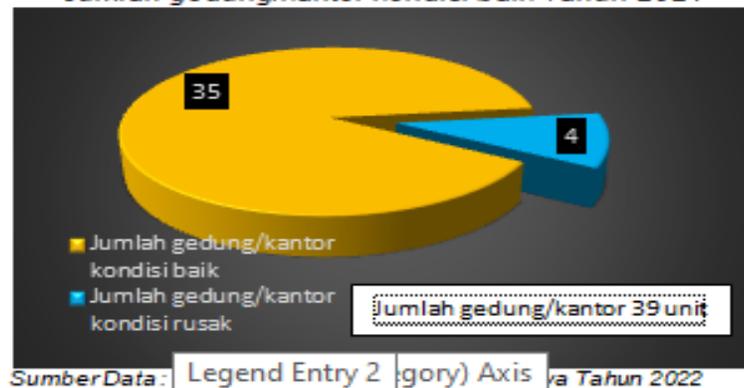


Diagram III.10  
Luas lahan yang di tata Tahun 2021



Diagram III.11  
 Persentase jalan kondisi mantap (baik dan sedang) Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2022

Diagram III.12  
 Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2021



Sumber Data : Pengolahan Data DD1 Bidang Bina Marga Tahun 2022

Diagram III.13  
 Jumlah Jembatan menurut kondisinya Tahun 2021



Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Bidang Bina Marga Tahun 2022

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	2019	0,77	1,34%
		2020	52,45	90,51%
		2021	65,54	111,63%

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	52,55	-	56,84	-	57,49	0,77	57,95	52,45	58,71	65,54

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:**

- ✓ Adanya Anggaran dana yang bersumber dari DAK
- ✓ Tersedianya pagu yang memadai yang mendukung pencapaian program dan sasaran;
- ✓ Penentuan indikator target berdasarkan rasio pagu yang ditentukan sehingga memudahkan dalam pencapaian target

- ❖ **Hambatan/masalah :**

- ✓ Lambatnya proses pelaksanaan barang dan jasa
- ✓ Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas dibandingkan dengan luas cakupan layanan irigasi yang ada
- ✓ Cuaca yang tidak mendukung pelaksanaan proyek
- ✓ Database terkait jaringan sarana dan prasarana permukiman masih belum memadai.
- ✓ Masih ada beberapa lokasi yang belum jelas kewenangannya
- ✓ Keterlambatan penyaluran dana bantuan

- ✓ Belum meratanya sumber daya listrik disetiap wilayah desa Kabupaten Luwu Timur
- ✓ Keterbatasan tenaga programmer pada program implementasi E-Government.
- ❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**
  - ✓ Percepatan proses pelaksanaan barang dan jasa
  - ✓ Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti diklat
  - ✓ Penyusunan masterplan sarana dan prasarana permukiman yang lebih komprehensif
  - ✓ Sinkronisasi database
  - ✓ Penambahan SDM Aparatur
  - ✓ Percepatan sosialisasi dan penyaluran bantuan
  - ✓ Membangun kerjasama dengan provider penyedia layanan telekomunikasi
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
  - ✓ Program Penyelenggaraan Jalan
    - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
      - a. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
      - b. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
      - c. Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
      - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
      - e. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
      - f. Sub Kegiatan Pelebaran Jembatan
      - g. Sub Kegiatan Rehalitasi Jembatan
  - ✓ Program Pengembangan Perumahan
    - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
      - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
  - ✓ Program Pengembangan Permukiman
    - Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman
      - a. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Kab/Kota

- b. Sub Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Kab/Kota
- ✓ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian.
- ✓ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
  - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
    - a. Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal
    - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
  - Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    - a. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
    - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi , Audit dan Pemanfaatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Program Pengelolaan Pelayaran

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha Yang Berdomisili dan Yang Beroperasi Pada Lintas
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  - a. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
  - b. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- ✓ Program Pengelolaan Penerbangan
  - Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
    - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
- ✓ Program Aplikasi Informatika
  - Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian program/kegiatan diatas, untuk indikator kerja Indeks Pembangunan Infrastruktur jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp.145.989.400.661 dengan realisasi sebesar Rp.137.473.605.101 atau 94,17%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 111,63%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,83%.

Misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mendorong Reformasi Birokrasi Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**” dengan tujuan “**Menguatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Kinerja Pelayanan Publik**”. Untuk mencapai misi 6, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung secara terpadu oleh urusan yang membidang Keuangan, Organisasi dan Tatalaksana, Pemerintahan dan Penelitian Daerah.

#### Sasaran Strategis 10

#### Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Pelayanan Publik

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*MENINGKATNYA PERWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK dan KINERJA PELAYANAN PUBLIK*” dengan 4(empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP**	100%**
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	68,12	61,06**	89,64%**
3.	Nilai LPPD	%	3,28	3,14**	95,73%**
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Nilai	83,21	85,03	102,19%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>96,89%**</b>		

#### A. Indikator Kinerja “*Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan adalah :

“**Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah**”.

Opini Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal masih dalam proses audit BPK sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya untuk tahun 2021 pada saat laporan ini dibuat. Namun demikian dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan Kabupaten Luwu Timur dapat digambarkan bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan hasil audit BPK memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga untuk tahun 2021 menggunakan data sementara realisasi tahun 2021. Data pendukung bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

B. Indikator Kinerja **“Nilai Akuntabilitas Kinerja”**.

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah

**“Penilaian opini yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB terhadap laporan SAKIP”**.

Untuk hasil penilaian evaluasi atas penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun pada 2021 sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian. Namun Jika dibandingkan antara tahun 2020 berdasarkan hasil penyerahan nilai akuntabilitas kinerja, kabupaten Luwu Timur memperoleh predikat B dengan nilai 61,06 sementara pada tahun 2019 memperoleh predikat B dengan hasil nilai evaluasi 60,17, dan tahun 2018 memperoleh predikat CC dengan nilai 58,06. Artinya penilaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai yang berarti bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kabupaten Luwu Timur sudah menunjukkan progres peningkatan dan kemajuan yang baik. Sehingga untuk tahun 2021 masih menggunakan angka sementara realisasi tahun 2020 yaitu 61,06. Adapun Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

	Komponen Yang Dinilai	Nilai			
		Bobot	2019	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	16,77	17,04	proses
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,10	15,22	proses
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,03	11,91	proses
d.	Evaluasi Internal	10	4,91	5,48	proses
e.	Capaian Kinerja	20	11,36	11,41	proses
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>60,17</b>	<b>61,06</b>	proses
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>B</b>	proses

Sumber data *Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setdakab. Luwu Timur Tahun 2021*

### C. Indikator Kinerja “*Nilai LPPD*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah :

#### **“Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh Kemendagri terhadap Laporan LPPD”**

LPPD sangat penting sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat undang-undang. Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD dilakukan setiap tahun untuk dapat mengetahui kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang hasil capaian kerjanya akan diperingkat secara nasional dan dituangkan dalam status kinerja (rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi). Berdasarkan status kinerja masing-masing daerah tersebut akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat (K/L) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Luwu Timur Nilai LPPD dapat dilihat sebagai berikut :

#### **Peringkat Kabupaten Luwu Timur :**

Tahun 2017 peringkat 102 nilai 3,18, dengan status “Sangat Tinggi”.

Tahun 2018 peringkat 103 nilai 3,14, dengan status “Sangat Tinggi”.

Tahun 2019 peringkat “ masih dalam tahap proses”

Tahun 2020 peringkat “.masih dalam tahap proses”.

Tahun 2021 peringkat “ menggunakan data sementara realisasi tahun 2018 yaitu 3,14 dengan status kinerja “Sangat Tinggi”

D. Indikator Kinerja “***Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik***”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah :

$$IKM = \frac{\text{total nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Untuk Nilai rata-rata IKM Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dengan target kinerja sebesar 83,21 (nilai) dan realisasi kinerja sebesar 85,03 serta capaian kinerja sebesar 102,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 84.31 dengan capaian kinerja sebesar 101,89%, terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 0,3% pada Tahun 2021. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Perangkat Daerah nilai tertinggi sebagian besar ada pada unsur penanganan pengaduan dan unsur biaya. Terkait meningkatnya nilai pada unsur biaya dimungkinkan terjadi karena adanya komitmen pimpinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa biaya/gratis dan publikasi standar pelayanan sebagian Perangkat Daerah. Dengan adanya kejelasan biaya pada standar pelayanan, masyarakat 86rog mengetahui besaran biaya/86rogre yang harus mereka keluarkan. Dengan adanya publikasi biaya dalam standar pelayanan, juga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan petugas/pelaksana pelayanan. Sedangkan peningkatan nilai pada unsur penanganan pengaduan dimungkinkan terjadi karena adanya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR. Sistem pengaduan secara online telah dikembangkan pada tahun 2019 sehingga pengguna layanan dengan mudah menyampaikan aspirasi dan aduannya karena tersedia beberapa media penerimaan pengaduan.

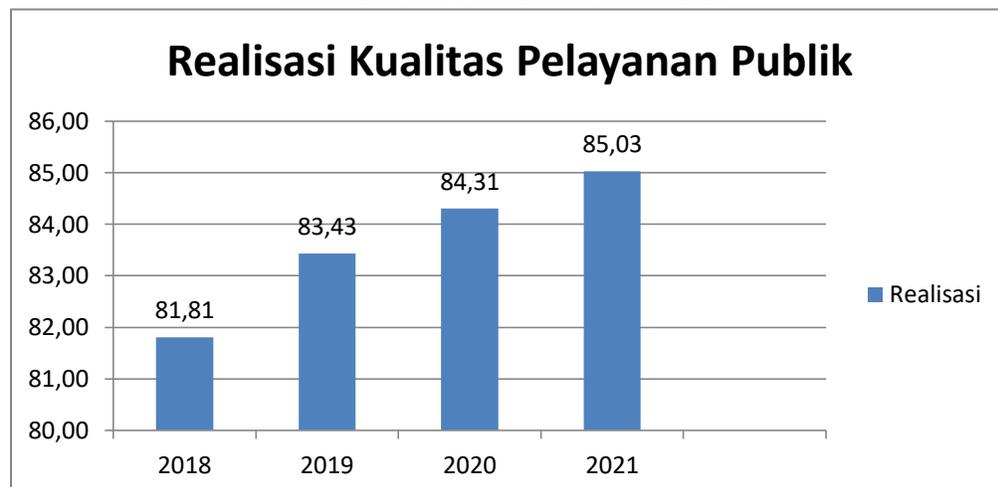
Pada Perangkat Daerah, unsur dengan nilai menengah sebagian besar pada unsur persyaratan, prosedur, produk layanan, dan waktu pelayanan. Berdasarkan analisis hasil 86rogre pada sebagian besar penyelenggara, penyebab unsur ini memperoleh nilai yang sedang dimungkinkan terjadi karena pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan

Publik kepada seluruh Unit Pelayanan Publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pada Perangkat Daerah, unsur dengan nilai terendah sebagian besar pada unsur waktu dan unsur sarana dan prasarana. Berdasarkan analisis hasil 87 orang pada sebagian besar penyelenggara, penyebab unsur waktu memperoleh nilai yang paling rendah adalah keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia. Sedangkan pada unsur sarana dan prasarana diperoleh nilai yang lebih rendah juga karena keterbatasan anggaran sementara tuntutan masyarakat semakin meningkat.

Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan, hal tersebut dipengaruhi oleh Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pembinaan pelayanan 87 progres dilaksanakan dengan melaksanakan fasilitasi dan monitoring evaluasi terhadap aspek kebijakan penyelenggaraan pelayanan 87 progres. Adapun 87 progres nilai IKM Pemerintah Kabupaten Luwu Timur setiap semester digambarkan dalam grafik berikut ini:

PROGRES NILAI IKM PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021



Sumber Data "Bagian Organisasi & Pendayagunaan Aparatur Setdakab. Luwu Timur Tahun 2021"

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Opini Laporan BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	2019	WTP	100%
		2020	WTP	100%
		2021	WTP**	WTP**

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	2019	60,17	97,95%
		2020	61,06	94,27%
		2021	61,06**	94,27%**

Capaian Nilai LPPD Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Nilai LPPD	Nilai	2019	proses	3,14**
		2020	proses	3,14**
		2021	proses	3,14**

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	Nilai	2019	83,43	101,40
		2020	84,31	101,89
		2021	85,03	102,19

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP**
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	55,85	55,86	58,08	58,08	61,43	60,17	68,12	61,06	68,12	61,06**
3	Nilai LPPD	3,17	-	3,01	3,14	3,10	3,14**	3,28	3,14**	3,28	3,14**
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik	78,46	78,46	81,82	81,81	82,28	83,43	83,21	84,31	83,21	85,03

- ❖ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja :**

#### **Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

- ✓ Peningkatan kapasitas sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi
- ✓ Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan Yang Lebih Responsif dan Kerjasama Yang Baik
- ✓ Penguatas Sistem Pengendalian Intern Dimana Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Setiap Triwulan

#### **Nilai Akuntabilitas Kinerja**

- ✓ Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai memperbaiki sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan komitmen pemimpin daerah bersama dengan para kepala OPD melakukan perbaikan pada dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran level OPD dimana sasaran strategis dan indikator beberapa OPD telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan target kinerja yang terukur.
- ✓ Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV walaupun belum merata diseluruh OPD
- ✓ Laporan Kinerja telah disusun sampai ke level OPD

- ✓ Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui Inspektorat

#### **Nilai LPPD**

- ✓ Meningkatnya kerjasama yang dilakukan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- ✓ Waktu pembahasan isi kerjasama tidak berlarut-larut

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik**

Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik adalah :

1. Persyaratan pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan

#### **❖ Hambatan/Masalah**

##### **Opini Laporan Keuangan :**

- ✓ Jumlah SDM pengelola keuangan kurang memadai yang menangani proses penatausahaan keuangan dan aset daerah
- ✓ Kurang cermatnya OPD dalam hal pelaporan keuangan sehingga menghambat proses rekonsiliasi data

##### **Nilai Akuntabilitas Kinerja :**

- ✓ Kapasitas para pengelola SAKIP yang masih kurang sehingga perlu untuk dilakukan penguatan pengelola SAKIP.
- ✓ Kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil masih belum berjalan dengan baik.

### **Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik**

- ✓ Tidak adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang dilakukan terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap masalah-masalah yang ditemukan dilapangan untuk perbaikan kedepan.

### **❖ Strategi/upaya pemecahan masalah :**

#### **Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

- ✓ Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Keuangan
- ✓ Penguatan Sistem Pengendalian Intern

#### **Nilai Akuntabilitas Kinerja :**

- ✓ Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria, terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih andal;
- ✓ Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (cascade down) dari level pemerintah daerah kepada OPD hingga level individu. Hasil penyempurnaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan pada Renstra OPD, program/kegiatan dan anggarannya, serta perjanjian kinerja individu untuk memastikan bahwa kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah hanya untuk mencapai sasaran strategis daerah;
- ✓ Menyusun rencana aksi setiap OPD sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja OPD dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal;
- ✓ Meningkatkan pemanfaatan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja pada laporan kinerja untuk memberikan umpan balik kepada para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja diperiode yang akan datang;
- ✓ Meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja OPD serta meningkatkan kualitas evaluasi dalam memberikan rekomendasi-

rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan penerapan manajemen kinerja yang berkelanjutan terhadap masing-masing OPD;

- ✓ Melakukan pelatihan SAKIP kepada pegawai sehingga mampu meningkatkan pemahaman pegawai terhadap penerapan manajemen kinerja;
- ✓ Membangun aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi.

#### **Nilai LPPD :**

- ✓ Adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- ✓ Berinovasi untuk melahirkan output kinerja yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat

#### **Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik**

- ✓ Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- ✓ Penyusunan Standar Pelayanan
- ✓ Perbaikan sarana dan Prasarana
- ✓ Peningkatan Kapasitas SDM
- ✓ Menyelenggarakan koordinasi, workshop, sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara pelayanan publik berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pelayanan Publik

#### **❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang sasaran**

- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
    - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
    - d. Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
    - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- g. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- h. Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
  - c. Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
  - e. Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga
    - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
    - c. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
    - d. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
    - e. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
    - f. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Penataan Organisasi
    - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
    - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana.
- ✓ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - Kegiatan Tata Pemerintahan
    - a. Sub Kegiatan Otonomi Daerah

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp.207.316.161.085 dengan realisasi sebesar Rp.205.665.916.834 atau 99,20%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 96,89% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 0,80%.

Misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mendorong Berkembangnya Kehidupan Religius Dan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama**” dengan tujuan “**Mengkondisikan Kehidupan Religius Dan Berbudi Pekerti Serta Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan**” Untuk mencapai misi 7, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang didukung oleh Urusan yang membidangi Kesatuan Bangsa, Politik dan Kesejahteraan Rakyat Setda.

#### Sasaran Strategis 11

#### Terwujudnya Kerukunan Masyarakat

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*TERWUJUDNYA KERUKUMAN MASYARAKAT*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Kinerja Penguatan Kerukunan Masyarakat	%	97,66%	17,09 %	17,50
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>17,50 %</b>		

#### A. Indikator Kinerja “*Cakupan Kinerja Penguatan Kerukunan Masyarakat*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh nilai cakupan kinerja penguatan kerukunan masyarakat adalah :

**((Jumlah konflik sosial yang ditangani / jumlah konflik sosial yang dilaporkan x 100%) + (Jumlah LSM, ORMAS, OKP dan Parpol yang aktif / Jumlah LSM, ORMAS, OKP dan Parpol keseluruhan x 100%) + (Cakupan kinerja kesejahteraan rakyat x 100%)) / 3**

$$\begin{aligned}
 &= (1 / 59 \times 100\%) + (155 / 155 \times 100\%) + (50,125 \times 100\%) / 3 \\
 &= (0,016) + (1) + (50,125) / 3 \\
 &= 17,09
 \end{aligned}$$

Untuk cakupan kinerja penguatan kerukunan masyarakat tahun 2021 target kinerja yang ditetapkan sebesar 97,66% dan terealisasi sebesar 17,09% dengan presentase capaian kinerja sebesar 17,50.%. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 sebesar 41,83% dengan persentase capaian kinerja sebesar 43,14%, menunjukkan adanya penurunan realisasi target. Adapun data pendukung pada indikator ini adalah bersumber dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari jumlah konflik sosial yang ditangani sebanyak 1 kasus, Jumlah Konflik Sosial yang dilaporkan sebanyak 59 kasus, kemudian jumlah LSM, ORMAS, OKP dan Parpol keseluruhan sebanyak 155 dan yang aktif sebanyak 155. Data Pendukung selanjutnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah terdiri dari jumlah kegiatan keagamaan dan perayaan hari besar keagamaan yang direncanakan sebanyak 15 kegiatan yang difasilitasi sebanyak 6 kegiatan, kemudian jumlah jemaah haji sebanyak 161 orang dan yang difasilitasi sebanyak 0 orang, jumlah masyarakat, tokoh agama, petugas keagamaan yang direncanakan mengikuti wisata religi sebanyak 0 orang dan yang mengikuti wisata religi sebanyak 36 orang, jumlah petugas keagamaan yang direncanakan diberikan insentif sebanyak 1514 dan yang diberikan insentif sebanyak 1514 orang. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Cakupan Kinerja Penguatan Kerukunan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Kinerja Penguatan Kerukunan Masyarakat	(%)	2019	0,98%	1,00
		2020	41,83%	43,14
		2021	17,09%	17,50

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Cakupan Kinerja Penguatan Kerukunan Masyarakat	94,51	-	98,10	-	98,11	0,98	96,97	41,83	97,66	17,09

- ❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian target kinerja adalah:**
  - ✓ Adanya pandemi covid-19 sehingga Program Fasilitas Keagamaan dan Masyarakat serta Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan tidak terlaksana.
  - ✓ Sasaran target 2021 mengalami peningkatan sehingga tidak ada faktor-faktor pendukung yang cukup untuk pencapaian target.
- ❖ **Alternatif/Solusi Pemecahan Masalah :**
  - ✓ Melaksanakan kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
  - ✓ Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
    - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
      - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika.
  - ✓ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- ✓ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- ✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.
- ✓ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.
- ✓ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp.24.347.929.273 dengan realisasi sebesar Rp.20.532.148.335 atau 84,33%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 17,50% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 15,67%.

Misi kedelapan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Meningkatkan Koordinasi Dan Kerjasama Antar Daerah**” dengan tujuan “**Mengembangkan Sistem Jaringan Kerjasama Strategis Antar Daerah**” dan “**Meningkatkan Persaingan Dan Kerjasama Yang Sehat Antar Daerah**” Untuk mencapai misi 8, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh urusan yang membidangi Pemerintahan Setda, Penelitian dan Pengembangan, Bagian Organisasi Setda.

### Sasaran Strategis 12

#### Berkembangnya Kerjasama Daerah dengan Berbagai Pihak

#### ❖ Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “*BERKEMBANGNYA KERJASAMA DAERAH DENGAN BERBAGAI PIHAK*” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Kerjasama Multipihak Yang dikembangkan	%	100	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>100%</b>		

#### A. Indikator Kinerja “*Cakupan Kerjasama Multipihak Yang Dikembangkan*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Cakupan Kerjasama Multipihak Yang di Kembangkan adalah :

**(Jumlah MoU yang difasilitasi dan diimplementasikan / Jumlah MoU yang difasilitasi) x 100%**

**= 35 / 35 x 100%**

**= 1 x 100**

**= 100**

Untuk cakupan kerjasama multipihak yang dikembangkan pada tahun 2021 target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100 dengan capaian

kinerja sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana realisasi kinerja sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian target kinerja. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah MoU yang dihasilkan dari Tahun 2017 ada 2 (dua) MoU atau dokumen kerjasama yang dihasilkan, Tahun 2018 ada 12 MoU, Tahun 2019 ada 35 MoU, tahun 2020 28 MoU dan Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 35 MoU yang dihasilkan, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah MoU yang dihasilkan pada setiap tahunnya. Adapun data pendukung dari indikator kinerja ini bersumber dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari Jumlah MoU yang difasilitasi dan diimplementasikan sebanyak 35 MoU dan Jumlah MoU yang difasilitasi sebanyak 35 MoU untuk tahun 2021.

❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Cakupan Kerjasama Multipihak Yang Dikembangkan Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Kerjasama Multipihak Yang Dikembangkan	%	2019	1,6	1,60%
		2020	100	100%
		2021	100	100%

❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 12 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								
1	Cakupan Kerjasama Multipihak Yang Dikembangkan	83,33	-	100	-	100	1,6	100	100	100	100

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah :**

- ✓ Adanya Komitmen Pemerintah Daerah dalam menangani isu-isu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan kerjasama;

- ✓ Adanya dukungan Pemerintah, baik dari pusat maupun provinsi terhadap kerjasama antar daerah dan pihak ketiga berupa pelimpahan kewenangan maupun penyediaan aturan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama daerah.
- ❖ **Alternatif/Solusi upaya pemecahan masalah :**
  - ✓ Perangkat Daerah harus mampu mengidentifikasi isu-isu yang dikerjakamkan sehingga mampu menangani permasalahan –permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah;
  - ✓ Perangkat Daerah menindaklanjuti MoU yang telah disepakati dengan Pimpinan Daerah dengan Perjanjian Kerjasama (PKS).
- ❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**
  - ✓ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
    - Kegiatan Tata Pemerintahan
      - a. Sub Kegiatan Otonomi Daerah

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp. 523.127.876 dengan realisasi sebesar Rp.425.150.300 atau 81,27%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 18,73%.

## Sasaran Strategis 13

## Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah

❖ **Membandingkan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis “ *BERKEMBANGNYA SISTEM INOVASI DAERAH* ” dengan 1(satu) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Cakupan Kinerja Pengembangan Inovasi Daerah	%	37,18	11,53	31,01
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>31,01%</b>		

A. Indikator Kinerja “*Cakupan Kinerja Pengembangan Inovasi Daerah*”

Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Luwu Timur Nomor 268/IX/Tahun 2019, formulasi cara untuk memperoleh Cakupan Kinerja Pengembangan Inovasi adalah :

**((Jumlah perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah / Jumlah total perangkat daerah x 100%) + (Jumlah hasil kelibangan/inovasi yang ditindaklanjuti / Jumlah kelibangan /inovasi dalam renja perangkat daerah x 100%)) / 2**

$$= (9 / 39 \times 100\%) + (0 / 0 \times 100\%) / 2$$

$$= (23,07) + (0) / 2$$

$$= 11,53$$

Untuk Indikator ini pada tahun 2021 target kinerja sebesar 37,18, realisasi sebesar 11,57 dengan capaian kinerja sebesar 31,01%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana realisasi kinerja sebesar 2,66 dan capaian kinerja sebesar 7,15%, artinya terjadi peningkatan target kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2021. Data pendukung pada indikator ini bersumber dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setdakab. Luwu Timur.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan terobosan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Inovasi dari tahun 2020 dan tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel**  
**Jumlah Perangkat Daerah dan Inovasi Yang Dihasilkan Tahun 2020**

No	Nama OPD	Judul Inovasi	Nama Inovator
1	Dinas PUPR	SIJAMATA (Sistem Informasi Jalan Jembatan)	SAHRIR SAHRUDDIN, ST, M.Si
2	BKPSDM	LA CUTI PNS (Layanan Cuti PNS)	EKSA PUTRA KUSUMAYANI
3	BPMPD	SI KODE ( Sekolah Desa )Kecamatan Malili	BASONDENG ABBAS, S.Sos
4	RSUD I Laga Ligo	SUSTER I LAGALIGO ( Sistem Rumah Sakit Terintegrasi I Lagaligo	Dr. BENNY
5	DISPARMUDORA	Kreasi PEMUJA Luwu Timur ( Kreasi Pemuda dan Remaja Luwu Timur)	BAKARA, Spd
6	Kantor Camat Tomoni Timur	Mobil Jenazah Tomoni Timur	DEDY SUTARYO,S.Sos
7	KANTOR CAMAT MALILI	PENATAAN DATA PEGAWAI DIGITAL PADA KANTOR CAMAT MALILI	HARIANTY IBRAHIM KARIM.SE
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	OPTIMALISASI PELAYANAN PEMBERIAN AIR DAERAH IRIGASI KALAENA	MUHAMMAD SALEH. S.T
9	Bagian Umum Sekretariat Daerah	JALAN - JALAN SEHAT (Alat Kontrol Perjalanan Dinas) pada Sekretariat Daerah	CENDANA WANGI, SE
10	Kantor Lurah Magani	Pelayanan Prima Melalui Smartphone di Kelurahan Magani	MULYANI, SE
11	UPTD BBI DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PANGAN	PENINGKATAN PENJUALAN BENIH IKAN	ANDI BASO MATTOREANG
12	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Efektifitas Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemerintah Kabupaten	SERLI TANGMALLUN, S.H

		Luwu Timur	
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	DATABASE DAERAH RAWAN BENCANA KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR	HERAWATY KAMARUDDIN, S.E.
14	Kantor Kecamatan Wotu	IMB ON CALL	Isdamayanti Basri, S. Pd.SD
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENATAAN DOKUMEN PASCA BENCANA BERBASIS DATA DIGITAL	DENNY FRANKLIN DE'E, ST
16	KANTOR CAMAT TOMONI	ARSIP DINAMIS SULIT DIPEROLEH JIKA DIBUTUHKAN	SAPRILLAH,S.M
17	Sat Pol PP dan Damkar	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Bahaya Kebakaran dan cara Penanggulangannya	Paulus Prianto Endoleku, S.Sos
18	SATPOL PP DAN DAMKAR	PENGOPTIMALAN RESPONSE TIME RATE MELALUI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG TEPAT GUNA	HASNIAR,S.Sos
19	SATPOL PP dan DAMKAR	PENYEBARLUASAN INFORMASI NOMOR ON CALL ATAU NOMOR EMERGENCY PEMADAM KEBAKARAN	IRAWATI, SH
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	LEGALITAS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)	HADI SUGIANTO.,ST
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. LUWU TIMUR	SATLAKAR TO QUICK RESPONSE (SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN MENUJU RESPON CEPAT)	SAIFUL SUDDING, SH
22	INSPEKTORAT KAB.LUWU TIMUR	ROADMAP 2 SIMHP (SISTEM INFORMASIH MANAJEMEN HASIL PEMERIKSAAN)	NURMIYATI, SP
23	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SI LUNA MAIN SOSMED (SEBARAN INFORMASI LAGU-LAGU NASIONAL	HERMAWATI, SE

		MELALUI INFOGRAFIS DAN SOSIAL MEDIA) DI KABUPATEN LUWU TIMUR	
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI MELALUI PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KECAMATAN MALILI	TINTIN SUMARNI, ST
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SIBAPER (SISTEM INFORMASI BANK DATA PERENCANAAN)	MARTINI, SE
26	KANTOR KELURAHAN MALILI	MALILI SADAR PBB	EKAWATI, S.AN
27	Kantor Kelurahan Malili	Sampah Tukar Rupiah	Notmayanti. A. Md
28	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	E-ARSIP DISTRANSNAKERIN	ERFINA, SE
29	Kantor Camat Malili	Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Malili (SIAP'MI)	Muhammad Ainul Haeruddin, S.STP
30	BKPSDM	SI JEMPUT PENSIUN (SISTEM PELAYANAN JEMPUT DOKUMEN PENSIUN)	ASMAWATI, S.AP
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Data itu mahal tapi lebih mahal tanpa data	Sugiyono ST
32	DINAS PERTANIAN	PENGDAAN DAN PELAYANAN BENIH PADI	I KOMANG DARMA, SP.
33	Kantor Camat Wasuponda	Si-Sigab ( Sistem Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala)	MASNAYANTI, SE
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. LUWU TIMUR	Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran untuk Meminimalisir dan Mencegah Kebakaran di Kecamatan Towuti	KASIM, S.Sos
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penataan Arsip Melalui Si-Surat (Sistem Informasi Surat)	SABIA, SE

**Tabel**  
**Jumlah Perangkat Daerah dan Inovasi Yang Dihasilkan Tahun 2021**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	NAMA INOVATOR
	Satpol PP	Repeater 247	Indra Fawzi, S.STP
	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	Balutta	-
1.	Puskesmas NUHA	Martabak Berdasi	Nurnia, SKM
2.	Puskesmas Angkona	Jendela Kita	Usman.,S.Kep.Ns
3.	Puskesmas Angkona	Bermalam Dipondok Malaria	Ketut Derana., S.Kep.,Ns
4.	Puskesmas Mangkutana	Pos Ajaib	Irma, SKM

Dari table diatas dapat diketahui bahwa secara umum indikator kinerja Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil inovasi pada tahun 2020..

- ❖ **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Capaian Persentase Cakupan Kinerja Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun berturut-turut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Cakupan Kinerja Pengembangan Inovasi Daerah	%	2019	19,88	62,65
		2020	2,66	7,15
		2021	11,53	31,01

- ❖ **Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Capaian Indikator Sasaran Strategis 13 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi								

1	Cakupan Kinerja Pengembangan Inovasi Daerah	21,67	-	27,57	-	31,73	19,88	37,18	2,66	37,18	11,53
---	---	-------	---	-------	---	-------	-------	-------	------	-------	-------

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pencapaian sasaran:**

- ✓ Kurangnya Sosialisasi Inovasi Daerah;
- ✓ Urusan bidang yang menangani terkait inovasi daerah yang melekat di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak berjalan dengan baik.
- ✓ Kurangnya kegiatan inovasi daerah.

❖ **Hambatan/masalah :**

- ✓ Masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk kegiatan inovasi
- ✓ Pengetahuan dan pemahaman ASN terkait inovasi masih sangat kurang.
- ✓ Kurangnya sosialisasi sehingga informasi yang tidak sampai ke pemangku jabatan.

❖ **Strategi/upaya pemecahan masalah :**

- ✓ Inovasi dimasukkan dalam program dan anggaran instansi
- ✓ Menjadikan inovasi sebagai budaya organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- ✓ Memahami bahwa inovasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi instansi.
- ✓ Sosialisasi

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang sasaran ini :**

- ✓ Program Sistem Inovasi Daerah
- ✓ Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dari uraian program/kegiatan diatas, jumlah pagu anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 sebesar Rp.791.884.655.dengan realisasi sebesar Rp.592.841.600 atau 74,86%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 31,01% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 25,14%.

### C. REALISASI ANGGARAN

Pada era otonomi daerah, akuntabilitas menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi untuk mewujudkan “**good governance** sekaligus **clean government**”. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola keuangan dengan berhasil guna dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk peningkatan pelayanan publik di daerah. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 13 sasaran strategis dengan 24 indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka besaran rata-rata capaian kinerja dan persentase realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel III.1  
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor-Sektor Pertanian	79,97%	99,00	1,00%
2	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	99,18%	84,22%	15,78%
3	Meningkatnya Apresiasi Nilai-Nilai Budaya Yang Mendukung Perekonomian Serta Ketahanan Budaya	103,97%	91,43%	8,51%
4	Terpeliharanya Keamanan Wilayah dan Keteriban Umum	96,73%	98,21%	1,79%
5	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	640,72%	98,14%	1,86%
6	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	405,62%	89,01%	10,99%
7	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	139,21%	99,09%	0,91%
8	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan	100,04%	98,36%	1,64%
9	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Daerah	111,63%	94,17%	5,83%

10	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Pelayanan Publik	96,89%	99,20%	0,80%
11	Terwujudnya Kerukunan Masyarakat	17,50%	84,33%	15,67%
12	Berkembangnya Kerjasama Daerah Dengan Berbagai Pihak	100	81,27%	18,73%
13	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah	31,01	74,86%	25,14%

Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp. 1.565.315.094.982,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.502.710.066.729,40 atau 96,00%, berdasarkan data hasil audit BPK. Adapun rincian PAD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1  
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD  
Tahun Anggaran 2021

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(RP)	(RP)	%
4	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>301.854.473.673,00</b>	<b>305.929.495.676,52</b>	101,35
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	178.777.000.000,00	183.113.097.975,64	102,43
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.268.982.400,00	4.264.277.325,50	80,59
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	22.079.184.191,00	22.896.489.793,00	103,70
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.729.307.082,00	95.673.630.582,38	99,94

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

### Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir tahun 2021, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.305.929.495.676,52 atau melebihi dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp.301.854.473.673,00 atau mencapai 101,35%. Dari jumlah realisasi pendapatan daerah tersebut, masing-masing kelompok pendapatan daerah memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 183.113.097.975,64 atau sebesar 102,43% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 178.777.000.000,00
2. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.264.277.325,50 atau sebesar 80,59 dari target yang direncanakan yakni sebesar Rp. 5.268.982.400,00.
3. Realisasi Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Sebesar Rp. 22.896.489.793,00 atau sebesar 103,70 % dari target yang ditetapkan 22.079.184.191,00.

4. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 95.673.630.582,38 atau 99,94% dari target sebesar Rp. 95.729.307.082,00.

**Aspek Belanja Daerah**

Tabel III.2  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
Tahun Anggaran 2021

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
5.1.	Belanja Operasi	1.069.471.694.897,00	1.020.460.593.809,88	95,42
5.2	Belanja Modal	294.681.085.995,00	282.411.798.100,52	95,84
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.451.400.000,00	58,06
5.4	Belanja Transfer	198.662.314.090,00	198.386.274.819,00	99,86
6.1	Penerimaan Pembiayaan	72.907.296.644,00	72.907.296.644,25	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.565.315.094.982,00</b>	<b>1.502.710.066.729,40</b>	<b>96,00</b>

Sumber : BKAD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

## D. CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Di tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

### 1. Piagam Ucapan Terima Kasih Atas Dukungan dan Kerjasama Ketenagalistrikan Tahun 2020



Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Menerima Penghargaan piagam ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama ketenagalistrikan tahun 2020 dari Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Malili, PT. PLN Persero yang diterima oleh Wakil Bupati Irwan Bachri Syam di Kantor Wakil Bupati Luwu Timur, Malili, (03/02/2021).

### 2. Penghargaan Pinisi Sultan Award 2021 Sebagai Kabupaten Pelopor Inovasi Sektor Perindustrian



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Penghargaan Pinisi Sultan Award 2021 sebagai Kabupaten Pelopor Inovasi Sektor Perindustrian dari Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Luwu Timur Drs. H. Budiman, M.Pd di Ballroom Lily Hotel Four Point Makassar Sherator, Makassar (08/03/2021).

### 3. Penghargaan Peduli Pers 2021



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima penghargaan peduli pers 2021 dari Ketua PWI Pusat Atal Sembiring Depari yang diterima oleh Bupati Luwu Timur Drs. H. Budiman, M.Pd di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar (10/04/2021).

### 4. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2021 dari Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI yang diterima oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Drs. Sukarti Secara Virtual di Aula Rujab Bupati Luwu Timur (29/07/2021).

### 5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama pada 2020



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama 2020 yang diterima oleh Bupati Luwu Timur Drs. H. Budiman, M.Pd di Mess Pemda Luwu Timur, Makassar (27/09/2021).

## 6. Penghargaan Inovasi Pelibatan Swasta Untuk Pembangunan RTH Terpadu



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Penghargaan Inovasi Pelibatan Swasta Untuk Pembangunan RTH Terpadu dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang diterima langsung oleh Bupati Luwu Timur Drs. H. Budiman, M.Pd di Hotel Gammara, (30/10/2021).

## 7. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat kategori Swasti Saba Wistara tahun 2019 - 2020



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat kategori Swasti Saba Wistara tahun 2019 – 2020 dari Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang diterima oleh Bupati Luwu Timur Drs. H. Budiman, M.Pd, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar, (25/11/2021).

## 8. Penghargaan Kabupaten Terbaik Nasional Kategori Percepatan SBS



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Penghargaan Kabupaten Terbaik Nasional Kategori Percepatan SBS dari Plt. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang diterima oleh Asisten Pemerintahan, Dohri As'ari, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar, (25/11/2021)..

## 9. Penghargaan STBM Award kategori Sanitarian Terbaik, Kepala Desa Terbaik & Natural Leader



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Penghargaan STBM Award kategori Sanitarian Terbaik, Kepala Desa Terbaik & Natural Leader dari Kementerian Kesehatan RI yang diterima oleh Irma SKM, Muh. Zaenal Bachri & Irwan, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar, (25/11/2021).

## 10. Penghargaan Smart Living



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Penghargaan Smart Living Dari Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Samuel Abrijani Pangerapan yang diterima Bupati Luwu Timur, Drs. H. Budiman, M.Pd, di ICE BSD City, Tangerang (14/12/2021), (14/12/2021)

## 11. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dengan predikat “Menuju Informatif



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 dengan predikat “Menuju Informatif dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani didampingi Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulsel, Pahir Halim, yang diterima Sekretaris Daerah, Drs. H. Bahri Suli, MM, di The Rinra Hotel Makassar (15/12/2021).

## 12. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 Tingkat Desa (Desa Balantang)



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 Tingkat Desa (Desa Balantang) dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani, yang diterima Kepala Desa Balantang, Musakkir Laiming, di The Rinra Hotel Makassar (15/12/2021).

## A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian 13 (tiga belas) sasaran dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja diperoleh rata-rata pencapaian keseluruhan adalah sebesar **155,57%**. Keberhasilan pencapaian ini tentunya tidak lepas dari upaya-upaya yang optimal dari seluruh Perangkat Daerah yang tidak hanya bekerja namun juga mampu berkinerja dengan cara menjalankan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) yang berfokus pada kemaslahatan bagi masyarakat.

Untuk lebih jelas, berikut ini disampaikan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebagai berikut :

### *Simpulan Umum atas Capaian Kinerja*

No	Sasaran Strategis	Nilai Capaian
1.	Meningkatnya Kontribusi Sektor-Sektor Perekonomian	79,97%
2.	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat	99,18%
3.	Meningkatnya apresiasi nilai-nilai budaya yang mendukung perekonomian serta ketahanan budaya	103,96%
4.	Terpeliharanya keamanan wilayah dan ketertiban umum	96,73%
5.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	640,72%
6.	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	405,62%
7.	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup	139,21%
8.	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan	100,04%
9.	Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Daerah	111,63%
10.	Meningkatnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kinerja Pelayanan Publik	96,89%**
11.	Terwujudnya Kerukunan Masyarakat	17,50%
12.	Berkembangnya Kerjasama Daerah Dengan Berbagai Pihak	100%
13.	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah	31,01%
<b>Rata-Rata Pencapaian Sasaran</b>		<b>155,57%</b>

## B. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Terhadap kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Mengadakan diklat peningkatan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas.
2. Peningkatan pelayanan publik melalui perbaikan standar-standar pelayanan, SDM serta pembangunan infrastruktur pendukungnya.
3. Penciptaan kondisi wilayah yang semakin kondusif dalam berinvestasi serta dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas unggulan daerah dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, Koperasi dan UMKM serta Pariwisata.
5. Pembangunan database kinerja yang handal, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga tersedia data yang akurat. Data akurat mendukung pengambilan kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik, maka Kabupaten Luwu Timur akan terus berbenah diri, memperbaiki kesalahan dan kegagalan yang pernah di dapatkan menjadi pengalaman yang berharga sebagai tolak ukur mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Malili,       Maret 2022



BUPATI LUWU TIMUR,

*[Handwritten signature]*  
Drs. H. BUDIMAN., M.Pd





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**INSPEKTORAT**

JL. Soekarno-Hatta No. TELP. (0474) 321455 FAX. (0474) 321455  
MALILI, 92981

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

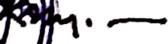
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Malili, 30 Maret 2022



INSPEKTOR KABUPATEN,

SALAM  WIEF, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 198903 1 007